



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPRRI
DENGAN
SEKJEN, DIRJEN IKMA, DIRJEN INDUSTRI AGRO, DIRJEN IKFT DAN
DIRJEN ILMATE
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: 19 (Sembinan Belas)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 13 Juni 2022
Waktu	: Pukul 10.25 WIB s.d. 13.18 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPRRI Gedung Nusantara I, Lantai 1, Jakarta
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti/Kepala Bagian Sekretariat Komisi VII DPRRI
Acara	: Progres pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 (dengan menyampaikan data kegiatan Satuan Tiga)
Hadir	: 30 orang anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPRRI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPRRI:

PIMPINAN :

1. Sugeng Suparwoto/F-P.Nasdem/Ketua Komisi VII DPRRI
2. Bambang Haryadi, SE/F.P.Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPRRI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

6 orang anggota dari 11 anggota

1. H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Mercy Chriesty Barend, S.T.
4. Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, M.M.
5. Ismail Thomas, S.H., M.Si.

6. Bambang Dwi Hartono

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. H.M. Gandung Pardiman, M.M.
2. Ir. Lamhot Sinaga
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, B.A., M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

3 orang anggota dari 6 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. R. Wulansari
3. Katherine A. Oendoen

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 4 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Akram, S.T., BE (Hons), M.Eng.Sc.
3. Rico Sia

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc., M.Sosio.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Muhammad Nasir
2. Rusda Mahmud
3. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

5 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. H. Rofik Hananto, S.E.
3. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
4. Hj. Nur Azizah Tahmid, B.A., M.A.
5. Dipl. Ing. Hj. Diah Nurwitasari, M.I.Pol.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang anggota dari 3 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.
2. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Sekjen Kemenperin RI (Ir. Dody Widodo, M.Si.)

2. Dirjen Industri Agro (Putu Juli Ardika)
3. Dirjen IKMA (Reni Yanita)
4. Sesditjen IKFT (Abdullah)
5. Sesditjen ILMATE Kemenperin RI (M. Arifin)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUGENG SUPARWOTO/F-P.NASDEM):

Mari kita mulai Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Eselon I Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Hadir di sini Sekretaris Jenderal, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA, Dirjen Industri Agro, Dirjen Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) dan Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) tadi sebagaimana disampaikan beliaunya tidak bisa hadir karena sakit.

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.*

Yang kami menghormati Pimpinan Komisi VII DPRRI, ini hadir nanti tadi kami komunikasi melalui *virtual*, Pak Maman kebetulan baru pulang dari Mandalika, betul? Iya, dan Pak Bambang juga sudah akan segera bergabung, Pak Edi Suparno demikian juga dan Pak Dony Oekon.

Yang kami hormati juga Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPRRI, baik yang hadir langsung dalam forum rapat ini maupun yang melalui *virtual meeting*.

Yang kami hormati jajaran Eselon I Kementerian Perindustrian sebagaimana saya sebut di muka tadi.

Pasti kita pertama-tama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Mahakuasa, kita semuanya dikaruniai nikmat sehat *wal afiat* dan syukur *alhamdulillah* ini Covid segera berlalu, badai pasti berlalu kata Eros Djarot ya, ini mudah-mudahan habis gelap terbitlah terang kata RA. Kartini. tentu saja, kita dapat membangun bangsa ini jauh-jauh lebih lugas dan kita dapat memajukan bangsa secara lebih cepat. Dan sudah barang tentu kita dapat menjalankan tugas fungsi melalui rapat ini untuk menjalankan tugas konstitusional kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII DPRRI untuk mengikuti rapat dengar pendapat pada hari ini.

Sesuai dengan undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, maka pada hari ini Komisi VII DPRRI akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Perindustrian menyangkut, dengan agenda, progres

pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022. Sekali lagi saya tegaskan bahwa rapat ini agendanya adalah progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022.

Bapak/Ibu sekalian.

Berdasarkan data sekretariat, anggota Komisi VII DPRRI yang telah hadir berjumlah 25 anggota dari 52 anggota dan terdiri dari 7 fraksi dari 9 fraksi. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPRRI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup". Oleh karena itu, Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan bersifat terbuka.

Bapak/Ibu sekalian apakah dapat disetujui? Baiklah Bapak/Ibu sekalian, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT : SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.25 WIB)

Sebelum melanjutkan rapat ini, saya mau memperkenalkan Bapak/Ibu sekalian bahwa di Komisi VII telah hadir, telah bergabung yang terhormat anggota baru menggantikan sudah barang tentu anggota yang digantikan dari fraksi yang sama. Pertama adalah saya perkenalkan yang terhormat Bapak Bambang Dwi Hartono, beliau adalah Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya di komisi VII menggantikan yang terhormat Bapak Novri Ompusunggu yang sekarang pindah ke Komisi III. Kedua adalah Bapak Bambang Hermanto, kebetulan belum hadir ya tapi biasanya sudah hadir dan ketiga, Hj. Nur Azizah Tamhid, ini dari Fraksi PKS.

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Sebelum melanjutkan rapat ini kami meminta persetujuan Bapak/Ibu anggota sekalian bahwa rapat ini akan selesai pada pukul 12 lewat 30 atau 2 jam sejak rapat ini dimulai dan apabila diperlukan bisa diperpanjang, bisa disetujui Bapak/Ibu sekalian?

(RAPAT : SETUJU)

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati.

Pada kesempatan hari ini Komisi VII akan mendalami realisasi rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga Kementerian Perindustrian di tahun anggaran 2022. Di mana pada APBN Tahun Anggaran 2022 disebutkan bahwa untuk anggaran Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebesar Rp2.860.000.000.000,- dari anggaran tersebut Komisi VII DPRRI ingin mendapatkan penjelasan secara detail perihal realisasi per Mei 2022 dan khususnya untuk kegiatan yang langsung berdampak kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini Komisi VII DPRRI ingin mendapatkan informasi terkait progres kegiatan masing-masing lembaga untuk tahun anggaran 2022 dengan harapan nantinya akan ada evaluasi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rencana kerja di tahun 2023 mendatang.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Untuk efektifnya waktu, kami persilahkan kepada sekretaris jenderal atau sekjen nanti dilanjutkan dengan IKMA dan dilanjutkan sesuai dengan tata aturan yang telah kami sampaikan tadi.

Dipersilakan yang terhormat Pak Sekretaris Jenderal Kemenperin.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua Komisi VII DPRRI.
Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPRRI atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan evaluasi program Kementerian Perindustrian Tahun 2022. Bisa saya informasikan Bapak, izinkan kami nanti yang menyampaikan presentasinya dimulai dengan tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan, dimulai dengan Bapak/Ibu Dirjen IKMA (Industri Kecil Menengah dan Aneka) Ibu Reni Yanita, lalu diikuti oleh Bapak Putu Juli Ardike Dirjen Agro Industri yang hadir bersama kita. Lalu selanjutnya karena Bapak Warsito sedang tugas ke luar negeri dia tidak bisa hadir, mungkin nanti yang izinkan kami apakah diperkenankan yang menyampaikan Bapak Sesditjen IKFT yaitu Bapak Abdullah. Lalu selanjutnya Dirjen ILMATE (Industri Logam Mesin dan Alat Transportasi dan Elektronika) yang hari ini tidak bisa hadir karena sakit. Ya, belum Pak, saya baru dapat kabar dari Sesditjenya dan apabila diperkenankan kami ingin menyampaikan presentasinya disampaikan Bapak Sesditjen ILMATE.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPRRI yang terhormat.

Dapat kami sampaikan postur anggaran Kementerian Perindustrian dalam APBN tahun 2022 sebesar Rp2,86 triliun yang bersumber dari rupiah murni sebesar sebesar Rp2,49 triliun, PNBPN sebesar Rp148,50 miliar, BLU sebesar Rp99,66 miliar dan SBSN sebesar Rp118,43 miliar. Di mana rincian alokasi belanjanya adalah sebagai berikut:

- Belanja pegawai sebesar Rp795,45 miliar.
- Belanja operasional sebesar Rp365,16 miliar.
- Belanja nonoperasional sebesar Rp1,77 triliun.

Dalam keseluruhan anggaran tersebut alokasi fungsi pendidikan sebesar Rp982 miliar dan fungsi ekonomi sebesar Rp1,87 triliun.

Pagu anggaran Kementerian Perindustrian tahun anggaran 2022 berdasarkan unit kerja.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Interupsi Pimpinan sedikit, izin Pimpinan.

Pak Sekjen ada nggak dana loan yang masuk kemarin, dana pinjaman luar negeri.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Untuk tahun ini tahun 2023, tidak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak 2021-nya? Eh 2022 ini.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Tidak ada.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

2022 tidak ada?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Tidak ada.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

2021?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

2021 juga tidak ada.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Jadi murni cuman ini aja perbelanjaan?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Dari APBN.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Dari dana-dana lain nggak ada?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Tidak ada.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Oke.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Dapat saya lanjutkan Bapak, izinkan.

Berdasarkan unit kerja Eselon I dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Jenderal sebesar Rp250,76 miliar atau berkisar 9% dari total anggaran Kemenperin.
- b. Ditjen Industri Agro sebesar Rp110,90 miliar sebesar sekitar 4%.
- c. Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil sebesar Rp114,23 miliar sekitar 4%.
- d. Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat transportasi dan Elektronika sebesar Rp186,06 miliar atau sebesar 7%.
- e. Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka sebesar Rp 416,41 miliar atau sebesar 15%.
- f. Inspektorat Jenderal sebesar Rp40,64 miliar atau 1%.
- g. Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebesar Rp666,54 miliar atau sebesar 23%.
- h. Ditjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional sebesar Rp97,30 miliar atau sebesar 3%.
- i. Badan Pengembangan Sumber Daya Industri sebesar Rp982,23 miliar atau 34%.

Sedangkan, pagu anggaran berdasarkan program tahun anggaran 2022, antara lain:

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp1,41 triliun sebesar 49%.
2. Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp957,50 miliar atau 34%.
3. Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp496,23 miliar atau 17%.

Bapak/Ibu dan Anggota Komisi VII DPRRI yang kami hormati.

Pagu Kementerian Perindustrian sebesar Rp2,86 triliun dengan pagu blokir hingga 31 Mei 2022 sebesar Rp237,67 miliar atau sebesar 8,30% dari pagu anggaran total. Pagu efektif sebesar Rp2,62 triliun atau sebesar 91,70%.

Dapat kami sampaikan perkembangan realisasi anggaran, hingga tanggal 31 Mei 2022 realisasi penyerapan anggarannya sebesar Rp752,42

miliar atau sebesar 26,26% dari pagu anggaran. Realisasi ini jika dibandingkan dengan target 31 Mei 2022 yaitu sebesar 31,94%, realisasi ini lebih rendah sebesar 5,68% dan jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi nasional sebesar 31,68%. Kementerian Perindustrian lebih rendah 5,42% dan berada pada posisi 60 dari 85 kementerian dan lembaga.

Sedangkan realisasi belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp7,93 miliar atau 22,61% dari pagu anggaran sebesar Rp35,10 miliar. Sedangkan realisasi kontrak sebesar 34,14% atau sebesar Rp44,42 miliar dari nilai kontrak yang sudah masuk sebesar Rp130,15 miliar.

Realisasi anggaran untuk masing-masing unit Eselon I sampai dengan 31 Mei 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal sebesar 26,83%.
2. Direktorat Jenderal Industri Agro sebesar 16,27%.
3. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil sebesar 20,74%.
4. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika sebesar 12,18%.
5. Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka sebesar 27,90%.
6. Inspektorat Jenderal sebesar 35,60%.
7. Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri sebesar 28,55%.
8. Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional sebesar 33,97%.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sebesar 27,15%.

Bapak/Ibu Komisi VII DPR RI yang terhormat.

Analisis rendahnya penyerapan anggaran, antara lain:

1. Beberapa kegiatan dengan pagu besar belum dapat dilaksanakan karena statusnya anggaran masih diblokir. Anggaran Kementerian Perindustrian yang statusnya diblokir sebesar Rp237,67 miliar terdiri dari:
 - 1) Blokir yang disebabkan oleh kekurangan dokumen pendukung, antara lain: laporan hasil review BPKP sebesar Rp112,95 miliar.
 - 2) Blokir yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait pencadangan anggaran *automatic adjustment* sebesar Rp124,71 miliar. Sebagai informasi saat ini Kementerian Perindustrian dalam proses pemenuhan tambahan *automatic adjustment* sebesar Rp135,51 miliar.
2. Beberapa kegiatan yang masih rendah realisasinya, antara lain:
 1. Kegiatan restrukturisasi industri berupa bantuan keringanan revitalisasi mesin untuk industri furniture dan kayu olahan sebesar Rp4,25 miliar masih dalam proses pencairan blokir, pelaksanaan kegiatan masih pada tahap persiapan yaitu rapat dan survei.
 2. Fasilitas program restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil kulit dan alas kaki senilai Rp11 miliar baru selesai proses

buka blokir, pelaksanaan kegiatan masih pada tahap persiapan yaitu rapat dan survei.

3. Beberapa jasa konsultan pada kegiatan dengan pagu besar belum selesai dilaksanakan, di antaranya:
 - Pendampingan dalam rangka peningkatan ekspor produk komoditas,...(*suara tidak jelas*)...sektor IKFT sebesar Rp3 miliar.
 - Pendampingan implementasi industri 4.0 sektor industri kimia hilir dan farmasi sebesar Rp4,8 miliar.
 - Fasilitas penguatan rantai pasokan industri dalam negeri menuju substitusi 4 produk IKFT sebesar Rp2,5 milyar.

Upaya kami dalam mempercepat pelaksanaan anggaran tahun anggaran, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan percepatan persiapan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi mempercepat kegiatan swakelola, mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, mempercepat pembukaan blokir dengan melakukan review BPKP dan melengkapi dokumen yang tidak lengkap.
- b. Melakukan percepatan persiapan penyaluran bantuan pemerintah meliputi penyusunan petunjuk teknis dan penetapan surat keputusan penerima bantuan pemerintah.
- c. Melakukan percepatan penyesuaian tagihan dan pengajuan surat perintah membayar SPM kepada KPPN.

Bapak/Ibu Komisi VII DPRRI yang kami hormati.

Terkait dengan progress pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 pada unit kerja sekretariat jenderal sendiri dapat kami sampaikan, postur anggaran setjen sebesar Rp250,76 miliar dengan pagu blokir sebesar Rp44,42 miliar sehingga pagu yang efektif sebesar Rp206,34 miliar sampai dengan 31 Mei. Rinciannya adalah:

1. Belanja pegawai sebesar Rp66,70 miliar.
2. Belanja operasional sebesar Rp55,35 miliar.
3. Belanja nonoperasional sebesar Rp128,71 miliar.

Dari belanja nonoperasional tersebut terdapat anggaran kegiatan prioritas nasional sebesar Rp60,50 miliar atau 47% dan kegiatan regular sebesar Rp68,21 miliar atau sebesar 53%. Anggaran sekretaris jenderal dialokasikan untuk melaksanakan dua program, yaitu:

- Program dukungan manajemen sebesar Rp183,3 miliar dengan realisasi anggaran mencapai 33,73%, dan
- Program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp67,3 miliar dengan realisasi anggaran sebesar mencapai 11,72%.

Postur anggaran sekretariat jenderal tahun anggaran 2022 bila dilihat berdasarkan jenis belanja, antara lain:

- Belanja pegawai sebesar Rp66,70 miliar.
- Belanja barang sebesar Rp161,39 miliar.
- Belanja modal sebesar Rp22,67 miliar.

Realisasi anggaran sekretariat jenderal sampai dengan 9 Juni mencapai 29,22% dengan rincian realisasi anggaran untuk masing-masing Eselon II, sebagai berikut:

- a. Biro Hukum 38%.
- b. Biro Umum sebesar 38%.
- c. Biro OSDM sebesar 33,02%.
- d. Biro Keuangan sebesar 35,04%.
- e. Biro Perencanaan sebesar 20,09%.
- f. Biro Humas sebesar 44,33%.
- g. Pusat Data dan Informasi sebesar 9,83%.
- h. Pusat Pemberdayaan Industri sebesar 12,27% dan
- i. Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 30,34%.

Selanjutnya apabila kita bandingkan antar target dan realisasi anggaran selama bulan Januari hingga Mei 2022, rata-rata realisasi masih berada di atas target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, realisasi anggaran sekjen sampai dengan akhir tahun 2022 dapat diharapkan mencapai 97,63%.

Bapak/Ibu Komisi VII DPR yang kami hormati.

Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja (perkin), beberapa indikator kinerja menjadi tanggung jawab unit sekretaris jenderal, antara lain:

- Indeks reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian.
- Presentase nilai capaian produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa sekretariat jenderal.
- Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretaris Jenderal.
- Tingkat akuntabilitas laporan keuangan dan BMN.
- Jumlah produk tersertifikasi TKDN di atas atau sama dengan 25% yang masih berlaku.

Dan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pelayanan internal beberapa di antaranya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- manajemen keuangan sebesar 47,92%.
- layanan organisasi dan tata kelola internal sebesar 51,95%.
- layanan hubungan masyarakat sebesar 40,35%.
- layanan sarana internal sebesar 41,13%.
- Serta KDN produk industri sebesar 21,76%.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VII DPR yang terhormat.

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pada rapat dengar pendapat hari ini, kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Pimpinan maupun Anggota Komisi VII DPRRI dalam rangka meningkatkan kualitas program Kementerian Perindustrian tahun 2022. Atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat kami sampaikan terima kasih banyak.

KETUA RAPAT:

Baiklah, dilanjutkan, selanjutnya adalah bagaimana tata urutan yang saya sebutkan tadi. Dipersilakan Pak Sekjen dilanjutkan dengan dirjen yang berkaitan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Ya, Ibu Reni.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN (RENI YANITA):

Terima kasih Pak Sekjen.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi VII DPRRI dan Bapak/Ibu para anggota dan Bapak/Ibu yang hadir di ruangan ini.

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka untuk menyampaikan capaian pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2022. Sebagaimana disampaikan Pak Sekjen tadi bahwa Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah secara postur penganggaran Kementerian Perindustrian ada 15%. Namun, sebelumnya kami ingin menyampaikan tugas dan fungsi Ditjen IKMA sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan juga PP 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, PP 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan UMKM dan juga Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penumbuhan Wirausaha Baru di dalamnya kami menginginkan IKM yang diharapkan adalah menjadi 4 keadan ataupun posisi.

Yang pertama, IKM berdaya saing kemudian IKM tersebut menjadi penguatan struktur industri nasional dengan menjadi rantai pasok dari sektor ekonomi maupun industri besar, kemudian IKM mampu ekspor, kemudian yang terakhir adalah IKM mampu menciptakan peluang kerja yang besar dengan tumbuhnya wirausaha baru yang ada.

Untuk mewujudkan 4 kondisi tersebut kami melakukan tugas dan fungsi dengan lingkup perumusan kebijakan, kemudian penguatan kelembagaan dan pemberian fasilitas.

Sampai dengan tahun 2022 ini kita lihat bahwa ada 4,41 juta unit usaha industri yang kategorinya adalah industri kecil menengah, sementara untuk industri besar hanya sejumlah 10.183. Jadi, secara postur unit usaha untuk unit usaha IKM ini sebanyak 99,7% dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 10.360.624 dan nilai *output* IKM terhadap industri tercatat 21,47%. Di sini kami mengacu kriteria IKM sesuai dengan PP 7 Tahun 2021 dengan melihat modal usaha dan juga jumlah tenaga kerjanya.

Untuk mewujudkan 4 IKM yang kami sampaikan di depan, kami mengelompokkan menjadi program. Yang pertama, peningkatan populasi IKM melalui kewirausahaan. Di sini, kami melakukan *basic* program yang pertama bagaimana menumbuhkan wirausaha baru berbasis santri. Di sini kita kenal dengan WUB santripreneur, kemudian wirausaha baru untuk daerah tertinggal, perbatasan, terluar dan pasca bencana. Di samping itu, juga kita melaksanakan program WUB sinergitas dengan kementerian lembaga lainnya, termasuk ada di dana dekonsentrasi.

Dalam meningkatkan ataupun akselerasi program WUB tersebut, kami melakukan berbagai program yang inovatif dan juga akselerasi. Di sana, kita melaksanakan *awarding*. Yang pertama Indonesia *food innovation*. Kemudian, kita juga menggali *startup for industry*. Kemudian, kami melakukan pendampingan bisnis teknologi alas kaki dan juga di dalamnya ada Bali *creative industry center* ini khusus untuk produk fashion dan kerajinan dan kriya.

Program yang kedua adalah penguatan IKM melalui peningkatan daya saingnya. Di sini kami melakukan pembinaan baik itu untuk pelaku IKM-nya secara individu ataupun melalui sentra. Jadi, data yang di awal tadi kami sampaikan jumlah unit usaha ataupun IKM-nya ada 4,4 juta, sementara untuk data sentra tercatat 10.500 catatannya seperti itu.

Jadi, untuk penguatan IKM melalui peningkatan daya saing ini, kami mencoba mengatasi permasalahan yang dihadapi IKM dari akses pembiayaan, sumber bahan baku, kemudian fasilitasi untuk teknologi dan sarana prasarana produksinya. Kemudian, dari sisi SDM-nya untuk kompetensi ataupun keahlian SDM-nya. Yang terakhir adalah peningkatan akses pasar.

Untuk mewujudkan 5 program tersebut kami melaksanakan kegiatan restrukturisasi mesin peralatan. Kemudian, fasilitasi-fasilitasi termasuk di dalamnya adalah fasilitasi untuk permesinan dalam upaya peningkatan teknologi ataupun kemampuan teknologi di IKM sampai dengan standar produk dan juga sertifikasi apa yang menempel di produknya dalam upaya mewujudkan IKM mampu berdaya saing dan juga mampu ekspor.

Di samping itu, kami juga melakukan kegiatan yang tidak kalah pentingnya adalah pameran untuk promosi, di mana mengenalkan produk IKM baik itu fisik maupun sekarang sudah mulai banyak IKM-IKM kita yang sudah difasilitasi *onboarding* dengan kami menerapkan yang namanya program *e-smart* IKM. Jadi *e-smart* IKM ini merupakan database IKM minimal dia sudah memenuhi semua sertifikasi ataupun perizinan yang menempel di IKM tersebut, kemudian dengan adanya *e-smart* IKM ini pelaku-pelaku IKM maupun sentra bisa mendapatkan fasilitasi ataupun program apa yang diterapkan oleh Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian.

Selanjutnya, terkait dengan capaian pelaksanaan program kegiatan Ditjen IKMA tahun 2022, kami bisa sampaikan di sini bahwa dari dana yang ada 15% dari postur APBN Kementerian Perindustrian yaitu 416,413 miliar. Kami juga ada *automatic adjustment* di sana sebesar 21 miliar, jadi ini yang

yang efektif adalah 394 miliar, tapi untuk realisasi masih memakai data yang 416 miliar ini.

Kemudian, dana yang ada kita bagi menjadi kelompok besar ada 3, untuk Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan ada di Sidoarjo sebesar 32 miliar, kemudian ada di dana dekonsentrasi meliputi 34 provinsi sejumlah 40,66 miliar, selebihnya dikelola oleh pusat ada di Sesditjen IKMA, kemudian ada di 3 direktorat teknis IKM, yang pertama Direktorat IKM Pangan Furniture Bahan Bangunan senilai 90,4 miliar. Kemudian, Direktorat Industri Aneka dan IKM Kimia Sandang kerajinan 92,38 miliar. Selanjutnya, IKM logam, mesin, elektronika dan alat angkut sejumlah 85,131 miliar selebihnya dikelola oleh Sesditjen yang kebanyakan adalah belanja pegawai dan juga dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman di direktorat. Jadi, untuk di sesditjen ada 75,603 miliar.

Kalau kita kelompokkan postur tersebut menjadi kegiatan prioritas nasional dan juga non-PN, kami sampaikan bahwa dari sejumlah dana tersebut ada 335 miliar yang merupakan kegiatan prioritas nasional. Di sana dalam upaya kita meningkatkan nilai tambah dan daya saing untuk industri aneka, kemudian untuk IKM pangan, *furniture* dan bahan bangunan, kemudian juga untuk IKM logam mesin, elektronika dan alat angkut, juga IKM kimia, sandang dan kerajinan. Kemudian yang dilakukan juga oleh Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan dalam upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing dari IKM alas kaki dan juga untuk tahun 2022 ini, kami melakukan pengadaan tanah untuk BIPP dalam upaya relokasi karena saat ini BIPP statusnya adalah lahannya masih pinjam di Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian dana prioritas nasional melalui nilai tambah dan daya saing di dekon juga ini kami.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Pimpinan, sedikit, tadi pembelian tanah berapa nilainya, Bu.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN (RENI YANITA):

19 miliar, Pak. Nah, untuk yang 34 provinsi ini juga kami lebih menekankan kepada kegiatan-kegiatan nonfisik termasuk di dalamnya bagaimana kita meningkatkan jumlah wirausaha baru yang merupakan cikal bakal dari IKM. Kemudian juga bagaimana kami melakukan pengembangan produk dan juga pengembangan sentra ataupun IKM yang ada di provinsi tersebut, di 34 provinsi.

Sampai saat ini 31 Mei catatan kami realisasi sampai dengan tanggal 31 Mei tahun 2022 ini sebanyak kalau boleh dibilang 28,5%. Jadi, memang ini targetnya menurun dari apa yang kami, capaiannya masih di bawah dari yang kami targetkan, tapi ketika kami konsolidasikan memang banyak kegiatan yang belum di-*e-mon*-kan kalau bahasanya seperti itu ataupun belum dilakukan pertanggungjawaban terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan.

Mungkin kita bisa lihat *slide* selanjutnya, Mas. Nah, ini kalau kita lihat dari 6 unit yang ada memang yang paling rendah adalah capaian untuk teman-teman di dana dekonsentrasi, ini masih 23,81%, kalau untuk BIPP tadi karena pembagiannya adalah tanah 19 miliar, jadi memang posisinya saat ini sedang terus apa namanya, kami melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan juga kementerian terkait untuk melakukan pembelian atas lahan ini, kita juga sudah terjadwal. Jadi, memang sampai saat ini BIPP realisasinya masih sangat kecil 14,37% karena memang ada dana 19 miliar di sana yang peruntukannya untuk pengadaan lahan.

Nah, jadi kalau boleh kami sampaikan selanjutnya *slide* 13, jadi secara postur kegiatan PN yang ada di Ditjen IKMA untuk tahun 2022 ini, Bapak/Ibu bisa melihat bahwa untuk penumbuhan wirausaha baru daerah potensial, ini memang porsi-porsinya paling banyak. Porsinya ini ada sekitar 38%, kemudian untuk penumbuhan wirausaha baru berbasis dana dekonsentrasi dan juga pondok pesantren dan juga sinergitas kementerian dengan lembaga 17% dan pengembangan produk 11% dan juga pemberdayaan ataupun pembinaan pengembangan di sentra IKM dan juga UPT 7%, kegiatan restrukturisasi 6% dan juga kegiatan prioritas nasional lainnya. Ini meliputi implementasi *making Indonesia 4.0* di beberapa sentra dan juga IKM. Kemudian pengembangan ataupun perumusan kebijakan untuk industri aneka, kemudian kegiatan untuk *startup*, juga kegiatan promosi dan juga HKI serta kemasan dan juga di dalamnya termasuk verifikasi terhadap *material center*.

Jadi, presentasinya seperti itu, kegiatannya juga untuk realisasi jadi target *output* untuk wirausaha baru berbasis daerah potensial 9.000 wirausaha baru sampai saat ini capaiannya baru 7.472 karena memang ada kegiatan lainnya yang belum tercatat ataupun belum dimasukkan di data *e-mon* kami, Pak.

Kemudian, untuk hal-hal yang masih belum tercatat di sini memang untuk tahapan melakukan suatu kegiatan memang kami memerlukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya masih survei ataupun evaluasi. Jadi, setelah itu dilakukan, baru kami melakukan kegiatan pendampingan sampai dengan kegiatan untuk mendapatkan fasilitas yang memang sudah diberikan, sebagai contoh misalnya untuk yang implementasi *making Indonesia 4.0* di sentra ataupun IKM, kami baru melakukan realisasinya masih sangat kecil karena memang ini kami sedang melakukan survei. Kemudian juga kita melakukan *self assesment* untuk IKM-nya nanti setelah ini setelah ada pendampingan-pendampingan dan juga rekomendasi untuk implementasi tersebut harapannya memang anggaran ini bisa optimal. Lanjut.

Ini yang wirausaha baru, jadi memang untuk wirausaha baru penumbuhan wirausaha baru ini berbasis dana potensial dan juga pondok pesantren, maupun kegiatan sinergitas dengan kementerian lembaga lainnya. Ini memang menjadi indikator kinerja utama Ditjen IKMA tercatat bahwa memang ada total wirausaha baru yang terlatih sebanyak 15.000 dan juga nanti dalam pelaksanaannya kita koordinasi dengan, bersama-sama dengan dinas untuk meningkatkan jumlah wirausaha baru tersebut yang mendapatkan NIB. Jadi, targetnya total WUB yang mendapatkan NIB 5.500. Jadi, target tersebut

Bapak dan Ibu, kita bagi ke 4 kelompok besar. Jadi, yang pasti kita ingin menentukan wirausaha baru berbasis komoditi dengan mengandalkan potensi yang ada di daerah, baik itu berbasis pangan, *furniture* dan bahan bangunan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Bapak Pimpinan, sedikit, izin, Pimpinan.

Saya melihat programnya yang disampaikan Ibu Dirjen ini, saya ngecek di program penjelasan Ibu di satuan tiganya, tidak dijelaskan barang apa yang dibeli di sini. Di satuan tiga ini kan harusnya dijelaskan apa yang dibeli dari proses.

KETUA RAPAT:

Pak Nasir, mohon maaf itu nanti bagian dari yang akan kita dalam, biarkan disampaikan dulu aja, nanti bagian dari pedalaman itu.

Terima kasih atas masukannya, yang terhormat Pak Nasir.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN (RENI YANITA):

Terima kasih Pak, mohon izin saya lanjut ya, Pak.

Nah, untuk target 15.000 itu kami bagi menjadi per direktorat IKM-nya jadi masing-masing mendapatkan target 3.500 wirausaha baru yang dilatih ataupun yang ingin ditumbuhkan dengan target masing-masing 1.500 wirausaha baru tersebut memperoleh NIB. Juga untuk yang dana dekonsentrasi ada target yang dilatih adalah 4.500 dengan yang mendapatkan NIB targetnya 2.000 wirausaha baru, seperti itu Pak.

Lanjut, nah kalau untuk kegiatan kami yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam upaya kita meningkatkan nilai tambah ataupun potensi sumber daya alam yang ada di daerah-daerah potensial, kami menyampaikan di sini sudah hampir seluruhnya atau bahkan 90% kegiatannya sudah terlaksana sesuai dengan jadwal, hanya ada beberapa yang masih dalam tahap koordinasi di sini untuk yang berbasis pangan, *furniture* dan bahan bangunan ada satu. Kemudian untuk yang berbasis wirausaha baru, berbasis industri kimia, sandang dan kerajinan ada satu, yang lainnya sudah terjadwal. Kegiatannya akan dilakukan kapan, kemudian juga di daerah mananya sudah terjadwal, Pak.

Harapan kami memang kegiatan yang masih tahap koordinasi ini untuk secepatnya bisa kita laksanakan karena memang kami di semester kedua ini sudah dapat *automatic adjustment* lagi Pak yang akan kita apa namanya, yang akan kita penghematan kalau bahasanya begitu ya Pak ya, sekarang APBNP di sananya penghematan seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk yang ruang lingkup kegiatan wirausaha baru ini sebagaimana diketahui kegiatan ini membangun wirausaha baru industri baik itu berbasis pangan, *furniture*, bahan bangunan maupun yang kimia sandang dan kerajinan dan juga logam, mesin,

elektronika dan alat angkut. Kemudian, kami juga memfasilitasi pembangunan wirausaha baru tersebut. Kemudian, juga ini juga di VALIDASI II: ROBERT J PURBA baru yang berbasis pesantren maupun kegiatan yang sifatnya sinergitas dengan kementerian lembaga ataupun lainnya.

Kemudian, kalau untuk yang wirausaha baru IKM berbasis dana dekonsentrasi, ini kita juga melakukan fasilitasi bimbingan teknis dan pendampingan kewirausahaan industri kecil dan menengah dan juga fasilitasi untuk pendaftaran izin usaha bagi WUB yang sudah kita tumbuhkan tersebut kemudian juga kegiatan sinergitas pembinaan industri melalui dana dekonsentrasi tersebut.

Kemudian untuk kegiatan pengembangan sentra IKM. Di sini kami juga membaginya tetap berdasarkan direktorat yang ada, IKM yang ada. Kemudian kita juga tugasnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan sentra IKM tersebut kemudian baik itu kemampuan dari sisi teknologinya maupun juga kami memfasilitasi dari akses-akses lainnya. Akses kemudahan bahan baku kemudian kami juga memfasilitasi kegiatan terhadap akses-akses pembiayaan dalam upaya kita meningkatkan daya saing dari IKM yang ada, baik itu IKM-nya maupun di sentranya. Termasuk di dalamnya juga kami memfasilitasi bantuan mesin dan alat untuk kelompok usaha bersama ataupun untuk IKM-IKM yang tergabung di dalam sentra tersebut.

Kemudian, terkait dengan kegiatan kami untuk pengembangan produk dan sertifikasi IKM, ini juga kami melihat bahwa dengan tujuan IKM tersebut berdaya saing ataupun IKM tersebut menjadi rantai pasok dengan kita menjalankan program kemitraan pasti ada sesuatu yang harus dipenuhi oleh IKM tersebut. Di sinilah kegiatan itu dilakukan termasuk di dalamnya juga kami melakukan pendampingan-pendampingan dan juga fasilitasi sertifikat SNI misalnya kalau memang produk tersebut yang dihasilkan IKM tersebut memang diwajibkan SNI-nya seperti kami melakukan sertifikasi untuk garam beryodium ataupun fasilitasi untuk IKM yang menghasilkan mainan anak seperti itu. Jadi, memang kegiatan ini diperuntukkan untuk memfasilitasi kegiatan IKM yang memang terhadap produknya diwajibkan harus mendapatkan sertifikat SNI wajib sebelum barang itu beredar.

Mungkin itu Pak, yang ingin kami sampaikan kalau yang lainnya memang kegiatan restrukturisasi mesin dan peralatan ini juga kami juga sudah ada juknis yang jelas. Jadi, kalau untuk secara perorangan ketika IKM tersebut ingin menambah ataupun meningkatkan utilisasi produknya pasti dia membutuhkan mesin dan peralatan. Nah, terhadap kegiatannya dia bisa mengusulkan untuk mendapatkan *reimbeurs*, Pak. Kalau ini kan restrukturisasi ini syaratnya adalah mesin baru dan juga dia mengajukannya ke kami sudah ada *timeline*-nya seperti itu. Jadi, ketika dia membeli mesin ataupun peralatan dalam negeri dia akan mendapatkan penggantian maksimal 40% dari nilai barangnya. Tapi, kalau barang impor, mesin impor dia hanya mendapatkan maksimal 25% dari nilainya. Tapi, ini juga tergantung dari alokasi anggaran yang kami dapatkan karena memang animo pelaku-pelaku IKM untuk mendapatkan program ini tiap tahunnya meningkat. Tetapi, karena dana kami

juga tiap tahunnya juga terbatas, ini juga kami harus menyesuaikan dan juga ada kriteria yang jelas dan juga persyaratan yang jelas untuk mendapatkannya.

Mungkin itu Pak yang ingin kami sampaikan terima kasih,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Dilanjutkan dengan tata urutan yang tadi sudah disebutkan sekarang Direktur Jenderal Industri Agro, dipersilahkan.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih, Pimpinan.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Ketua, izin Pimpinan.

Bisa nggak 1 menit aja saya tanya ke Ibu ini? Izin Ketua.

KETUA RAPAT:

Izinkan sampaikan dulu nanti lantas kita dalam bersama.

Dilanjutkan.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI (PUTU JULI ARDIKA):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Ketua dan yang saya hormati anggota Komisi VII DPRRI.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua.

Perkenankan kami langsung ke realisasi pelaksanaan kegiatan. Jadi, kalau kami lihat di sebelumnya ya, halaman sebelumnya. Jadi, sebagaimana tadi Pak Sekjen menyampaikan bahwa anggaran di Industri Agro ini sebesar 4% dari pagu yang ada di Kementerian Perindustrian, jadi besarnya 110,4 miliar. Kalau kita lihat ini apa 48 hampir 50-50 sebagai prioritas nasional dan 51% atau 56,4 ini sebagai prioritas KL. Anggaran ini tersebar di 4 direktorat, termasuk sesditjen. Di sesditjen itu ada 34,9%, di industri hasil hutan dan perkebunan itu 23,26%, di industri makanan hasil laut dan perikanan ini 18,7% dan di industri minuman, bahan penyegar 23%.

Pimpinan yang saya hormati,

Di anggaran ini ada 8,2 masih blokir dan sekarang ada blokir *automatic* itu sekitar 8 miliar lagi, sehingga 16 miliar atau 14,5% yang secara operasional belum bisa digerakkan. Jadi yang sekarang bisa digerakkan sekitar 85% atau Rp94 miliar. Jadi kalau kita lihat strukturnya belanja pegawai itu 18% atau 20,3 miliar, belanja operasional 5,6% atau 6,2 miliar dan sisanya adalah belanja nonoperasional yaitu 83,8 miliar.

Nah, realisasi per jenis belanja Pimpinan, belanja pegawai ini sudah 61,8 apa 38,14% karena ini masih bulan Juni dan nanti sisanya akan segera direalisasikan berdasarkan bulan. Nah, untuk belanja modal ini sudah direalisasikan 96,3% jadi sisa masih 3,7%, yang masih banyak tersisa adalah di belanja barang. Jadi, belanja barang nanti berikutnya kami jelaskan kenapa ini masih banyak tersisa, tapi sebelum masuk ke belanja barang dan perkenankan kami menyampaikan capaian perjanjian kinerja tahun 2022 kalau kami perhatikan di sini, baik itu dari tujuan industri agro, ini udah cukup bagus di T itu adalah target, setelah kinerja T adalah target, R itu realisasi dan C adalah capaian.

Jadi terkait dengan peran agro dalam perekonomian, jadi peran agro di PDB industri nonmigas ini selalu bisa dipertahankan di atas 50% kontribusinya, ini walaupun anggarannya cuma 4%. Jadi, berkontribusi lebih dari 50% untuk industri nonmigas. Jadi, capaiannya juga cukup bagus untuk 68% sampai 91%. Untuk peningkatan daya saing ini apa antara 26% sampai 108%. Untuk penguatan implementasi *making Indonesia 4.0* ini 93%. Untuk meningkatkan kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri ini 97% sampai dengan 137%, untuk meningkatkan penguasaan pasar ini dari 39% sampai 146% dan dari ketersediaan pembangunan...*(suara tidak jelas)*...efektif ini memang datanya belum ada karena ini setiap, biasanya di akhir tahun, Pak Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat.

Demikian juga untuk tujuan dan sasaran yang lain ini cukup besar, saya tidak bacakan satu per satu. Nah, selanjutnya proses pengadaan barang dan jasa, di sini ada 29,3 miliar, Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, dari 20 pengadaan. Nah, 20 pengadaan ini prosesnya udah selesai 2 dan sebagian itu masih dalam proses pelaksanaan dan sebagian masih pengadaan penyedia jasa dan memang ada beberapa yang dokumennya perlu *review* dan menunggu karena Kementerian Perindustrian berupaya untuk di dalam pengadaan ini memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan itu bisa diatur dalam permenperin-nya, sehingga kami ada beberapa yang menunggu persetujuan izin, persetujuan Menteri Perindustrian untuk kiranya disetujui ada beberapa produk-produk yang memang untuk spek tertentu belum diproduksi dalam negeri sehingga itu masih dilakukan importasi.

Nah, ada satu program yaitu lembaga pengelola program pembiayaan revitalisasi mesin untuk industri, *furniture* dan kayu olahan, tadi udah diterangkan juga oleh Pak Sekjen bahwa ini diblokir, yang nilainya 400 juta, ya karena ini diblokir yang 9 miliar itu nggak bisa bergerak Pak karena menunggu lembaga pengelola lain. Sehingga nanti kami dengan sekjen akan berupaya

untuk mempercepat, sehingga ini ada sekitar kalau nilainya di sini sekitar 26,5 tapi sebenarnya ada 36% yang masih kondisinya dalam proses pengadaan dan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi, ini cukup besar, nah sehingga ini sedikit menunda realisasi yang semestinya kita sudah rencanakan.

Tapi kegiatan-kegiatan lain *slide* selanjutnya untuk perbaikan rantai pasok industri agro, ini sudah terealisasi dari 7% sampai dengan yang terbesar itu 21%, demikian juga penumbuhan industri substitusi impor dan hilirisasi industri agro ini juga sudah direalisasikan dari 8,9 sampai yang terbesar 15,57%. Untuk peningkatan dan pemanfaatan teknologi dan inovasi, ini memang baru 6% kan tadi karena olahan kayu, terutama tadi sudah kami laporkan ini sedang mencoba, mendorong Politeknik Astra untuk bisa bekerja sama dengan dibiayai oleh dana pendidikan di Kementerian Keuangan membuat mesin pengolahan kayu Pak, ini karena aturannya seperti itu, Pak Menteri meminta untuk ini bisa dikerjakan di dalam negeri sehingga ini menunggu waktu untuk bisa dihasilkan itu dulu sehingga pengadaannya bisa didorong benar-bener menggunakan produksi dalam negeri.

Standar industri juga udah kami lakukan yaitu realisasi ada 9,2% sampai 20%, demikian juga P3DN di sektor industri agro ini antara 6 sampai dengan 31%. Peningkatan kerja sama dan investasi di bidang industri agro ini antara dengan 8 sampai dengan 16% dan fasilitasi fiskal dan nonfiskal industri agro ini sudah cukup tinggi antara 27 sampai dengan 32%. Implementasi industri 4.0 di industri agro ini sudah mencapai 12%, manajemen kesekretariatan, ini memang sudah cukup tinggi, yaitu dari 23 ada yang sampai 100%.

Mungkin Pimpinan, Anggota Dewan yang saya hormati. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Dilanjutkan.

SESDITJEN IKFT KEMENPERIN RI (ABDULLAH):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Pimpinan Komisi VII DPRRI, dan
Yang saya hormati para Anggota Komisi VII DPRRI.

Izin Pimpinan, kami mewakili Plt. Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil menyampaikan progres kegiatan Direktorat Jenderal Kimia, Farmasi dan Tekstil tahun 2022. Capaian kinerja industri tekstil dan aneka ini di tahun 2022 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Direktorat IKFT pertama adalah kami berdasarkan per 31 Mei 2022, berdasarkan indikator

kinerja utama dari pada Direktorat Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil ini pertama adalah pertumbuhan PDB dan IKFT 4,71% dan atau 81,63% dari target 5,7%.

Yang berikutnya adalah kontribusi IKFT terhadap PDB 4,3% atau 98,62% dari target tahun 2022 4,3%. Berikutnya adalah perusahaan dengan nilai Indonesia industri 4.0 industri indeks, indi 4.0 kurang lebih 3, di sektor IKFT ada 21 perusahaan sudah mencapai 140% dari target tahun 2022, 15 perusahaan.

Berikutnya adalah persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Direktorat Jenderal IKFT 11,79% dari 14,74% dari target 2022 atau 80%.

Berikutnya adalah substitusi impor produk IKFT 4,73% atau 9,80% dari target 2022 atau target 35% di tahun 2022. Berikutnya adalah nilai investasi sektor industri kimia, farmasi dan tekstil, ada 6,9% dari target tahun 2022 93,29%. Berikutnya adalah kontribusi ekspor produk IKFT berteknologi tinggi ada 4,63% atau 89,04 dari target tahun 2022 5,20%. Pertumbuhan ekspor produk IKFT 0,10% atau 1,14% dari target 2022 874%.

Berikutnya adalah rasio impor dan bahan baku IKFT terhadap PDB sektor industry nonmigas 17,32% atau 95,7% dari target 2022 18,14%. Berikutnya adalah peningkatan utilisasi sektor industri kimia, farmasi dan tekstil 74,72% atau 116,4% dari target tahun 2022 64,17%.

TKDN sektor IKFT 48,82% atau 131,10% dari target 2022 37,42%. Berikutnya adalah kontribusi ekspor produk IKFT terhadap total ekspor 17,15% atau 94,23% dari target tahun 2022 18,20%. Nilai ekspor produk IKFT 9,21 miliar atau 26,28% dari target tahun 2022 35,05 miliar.

Berikutnya adalah realisasi DIPA Ditjen IKFT, postur dan realisasi anggaran Ditjen IKFT tahun 2022. Postur anggaran terdiri dari belanja barang 92,237 atau 81%, belanja pegawai 21 miliar atau 18% dari total pagu anggaran di tahun 2022 114,24 miliar. Adapun realisasi sampai dengan 31 Mei 21,32%, realisasi berdasarkan unit kerja, pertama adalah sekretariat 11,63%, Direktorat Industri Bahan Galian nonLogam 12,2 ...*(suara tidak jelas)*...ada 1,17%. Direktorat Industri Kimia Hulu 4,14%, Direktorat Kimia Hilir dan Farmasi 4,09% dan Direktorat Industri Tekstil dan Alas Kaki 3,32% ini berdasarkan per 31 Mei.

Adapun kinerja Dirjen ...*(suara tidak jelas)*...per eselon II status sebagai 31 Mei tahun 2022 dapat dilihat sebagai tabel berikut, tadi sudah saya sampaikan bahwa capaian dari masing-masing. Adapun per jenis belanja anggaran Direktorat Jenderal IKFT, belanja pegawai 21 miliar realisasi 32,88%, belanja barang 92,236 miliar, realisasi 18,72%, belanja modal 1,002 miliar realisasi 17,55%. Jadi, dari pagu anggaran 114,24 miliar ini atau 21%, sedangkan jika dibandingkan dengan Kemenperin, Kemenperin 26,08%.

Berikutnya adalah progres kegiatan Ditjen IKFT tahun 2022, progress kegiatan direktorat berdasarkan masing-masing Direktorat Jenderal. Yang

pertama adalah ini adalah realisasi fisiknya, restrukturisasi mesin dan peralatan industri tekstil, kulit dan alas kaki, program ini adalah dalam rangka meningkatkan daya saing tekstil dan produk tekstil serta bagaimana kita menjalankan peta jalan *making Indonesia 4.0*, itu ada 5,56 fisiknya.

Berikutnya adalah penyusunan program nasional perumusan standar atau PPNPS SNI dan peminat standar industri tekstil kulit dan alas kaki 4,69. Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri produk industri tekstil, kulit dan alas kaki 11,23. Rekomendasi kebijakan fiskal, nonfiskal sektor industri tekstil, kulit dan alas kaki 39,99. Neraca komoditas industri sektor tekstil, kulit dan alas kaki 33,68, memfasilitasi implementasi industri 4.0 sektor tekstil dan *apparel* 4,93%. Penyusunan perencanaan dan penganggaran Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki 40,37%. Yang berikutnya adalah layanan *monitoring* dan evaluasi internal Direktorat Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki 22,61%.

Berikutnya adalah progres kegiatan Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi tahun 2022. Yang pertama adalah kajian pemanfaatan teknologi *material recovery and...(suara tidak jelas)...20%,...(suara tidak jelas)...* bahan aktif obat produk dalam negeri 10%, usulan PNPS sektor industri kimia hilir dan farmasi 5%. Forum sektor industri kimia hilir dan farmasi 50,00%, koordinasi pemberian insentif industri kimia hilir dan farmasi 20%. Berikutnya adalah pendampingan implementasi industri 4.0 sektor industri kimia hilir dan farmasi 25, penyusunan neraca komoditas industri kimia hilir dan farmasi 15%, penyusunan perencanaan dan penganggaran Direktorat Industri Kimia dan Farmasi 80%, layanan *monitoring* dan evaluasi internal Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi 50.

Berikutnya adalah progress kegiatan Direktorat Industri Kimia Hulu tahun 2022. Pertama adalah rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri garam industri 20,30%, rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri bahan baku obat 5,72%, rekomendasi kebijakan terkait penerapan harga gas bumi dan tertentu untuk industri *monitoring* dan evaluasi...*(suara tidak jelas)*...dan bahan bakar lainnya 53,42, rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri pupuk pestisida 40,20, rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja sektor industri kimia hulu 4,85, rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kimia anorganik 5,06, rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri kimia organik 33,60, fasilitasi investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri petrokimia di Teluk Bituni 22,60.

Berikutnya adalah progres Direktorat Industri Kimia Hulu tahun 2022. Berikutnya adalah progres kegiatan Direktorat Industri Semen Keramik Pengolahan Bahan Baku Galian Non-Logam. Pendampingan implementasi industri 4.0 sektor industri semen dan keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam 26. Rekomendasi kebijakan rantai pasok sektor industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam 22. Fasilitasi pembangunan pusat pengolahan bahan baku mineral nonlogam 21. Penyusunan neraca komoditas industri semen, keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam 24.

Penyusunan perencanaan dan penganggaran Direktorat Industri Semen keramik dan pengolahan bahan galian nonlogam 32. Layanan *monitoring* dan evaluasi internal Direktorat Industri Semen Keramik Dan Pengolahan bahan galian nonlogam 51.

Berikutnya adalah progres kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal IKFT tahun 2022. Yang pertama adalah penyusunan *roadmap* tingkat komponen dalam negeri sektor industri kimia, farmasi dan tekstil 15. Berikutnya adalah pendampingan dan fasilitasi peningkatan ekspor Direktorat Jenderal IKFT 15. Penguatan rantai pasok dan industri dalam negeri menuju substitusi impor produk IKFT 10. Berikutnya adalah layanan BMN 41,65, layanan hukum 41,65 juga, layanan organisasi dan tata kelola internal 41. Layanan umum dan perlengkapan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil 19,67. Layanan data dan informasi 41,65. Layanan perkantoran 41,65. Layanan sarana dan internal 20,55. Layanan manajemen SDM 45, penyusunan perencanaan dan penganggaran Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil 24,09. Layanan *monitoring* dan evaluasi internal Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil 10, layanan manajemen keuangan 41,65, layanan reformasi kinerja 41,65, layanan penyelenggaraan kearsipan 41.

Berikutnya, kalau kita lihat dari tabel berdasarkan progres pengadaan barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal IKFT tahun 2022, dari beberapa proses tender yang sudah dilakukan ada beberapa yang sudah selesai, ada beberapa juga yang masih dalam proses di UKPBJ Kementerian Perindustrian, yang tentunya ada beberapa yang akan berkontraksi dan estimasi kontrak ada yang di bulan April dan bulan Juni.

Mungkin itu saja pimpinan dan para anggota yang dapat kami sampaikan, progres dan kegiatan Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil tahun 2022.

Terima kasih.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Dilanjutkan selanjutnya.

SESDITJEN ILMATE KEMENPERIN RI (M. ARIFIN):

Baik.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi menjelang siang.

Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua Komisi VII, Bapak/Ibu Anggota Komisi VII, baik yang hadir secara fisik maupun secara daring. Bapak Sekjen, Ibu Dirjen dan Bapak/Ibu yang hadir di ruangan ini.

Izin Pak Ketua, kami mewakili Pak Dirjen yang pada hari ini beliau kurang enak badan dan menugaskan kami untuk bisa menyampaikan paparan ini terkait dengan capaian kinerja realisasi anggaran di sektor.

KETUA RAPAT:

Catatan Pak Dirjen ya, lain kali kalau begini dibuktikan dengan surat dokter karena ini adalah kegiatan kenegaraan. Jadi, sekali lagi ini menjadi catatan kita semuanya, untuk kali ini okelah kita katakanlah toleransi, lain kali tidak toleransi, nggak boleh alasan tidak enak badan itu, harus ditunjukkan dengan surat dokter karena memang dinyatakan sakit, tidak bisa hadir.

SESDITJEN ILMATE KEMENPERIN RI (M. ARIFIN):

Siap, Bapak, terima kasih.

Baik, izin Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, kami ingin menyampaikan kinerja makro di sektor ILMATE tahun 2022 sampai dengan triwulan pertama. Di sektor ILMATE sebetulnya tumbuh 9,86% Pak, kemudian kalau kita *breakdown* per direktorat, industri alat angkut itu triwulan pertama di tahun 2022 tumbuh positif 14,2%. Kemudian industri mesin dan perlengkapan juga tumbuh sebesar 9,9%. Industri logam dasar juga mengalami pertumbuhan 7,90% dan industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik juga mengalami pertumbuhan sekitar 6,80%.

Next, next slide, kemudian kalau kami coba melihat dari apa namanya, kontribusi sektor ILMATE di triwulan pertama di 2022 ini di 5 besar kontribusi...*(suara tidak jelas)*...nonmigas terhadap PDB, dimana ada industri logam, komputer barang elektronik optik itu berkontribusi sekitar 1,53 secara nasional. Termasuk juga industri alat angkutan juga mengalami, mendapatkan kontribusi sebesar 1,53.

Next slide. Kemudian, kami coba lihat lagi dari kinerja makro sektor ILMATE sisi investasi, 5 besar investasi sektor industri triwulan pertama 2022 itu 2 di sektor ILMATE itu adalah industri logam dasar, barang logam, mesin dan peralatannya juga berkontribusi 39,67%. Kemudian, industri kendaraan bermotor juga 8,16%.

Next slide. Kemudian, kami ingin sedikit sampaikan capaian sasaran strategi di Ditjen ILMATE, tadi kami sudah sampaikan pertumbuhan PDB industri logam, mesin dan alat transportasi dan elektronik atau ILMATE ini targetnya adalah 4,90% tetapi capaiannya sudah 9,86%, berarti meningkat jauh di atas target yang kita tetapkan. Kemudian, kalau dilihat dari...*(suara tidak jelas)*...program pertama, meningkatkan daya saing dan kemandirian, nilai investasi target kita itu adalah 142,25T di tahun ini, capaiannya sudah 50,80 triliun. Utilisasinya, targetnya adalah 57,60% sudah mencapai 60,16%.

Kemudian dari penguatan implementasi *making industri 4.0* perusahaan dengan nilai Indonesia industri 4.0 atau *readiness index* targetnya 16 perusahaan sudah mencapai 24%. Kemudian kontribusi ekspor penduduk industri berteknologi tinggi dari target 5,87% capaiannya sekarang sudah menjadi 4,50%. Dan dari sisi meningkatnya kemampuan industri dalam negeri, persentase nilai capaian P3DN dalam pengadaan barang dan jasa, dari target 77% capaiannya sudah 47,83%. Termasuk juga substitusi impor produk industri pengolahan nonmigas capaiannya, meskipun masih 0,75% dari target 35%. Kemudian tingkat komponen dalam negeri capaiannya adalah 43,47% dan targetnya adalah 50,42%. Termasuk juga meningkatnya penguasaan pasar nilai ekspor capaiannya sudah menjadi 18,61 miliar US dolar dari target 34,01 US dolar.

Kemudian dari pertumbuhan ekspor capaiannya sudah mencapai 42,76% dari target 8,01%, dari kontribusi ekspor capaiannya sudah 28,13% dari target 22,3%. Ratio impor bahan baku capaiannya 19,73% dari target 10,76%.

Next. Nah, kami ingin sampaikan pagu anggaran kami terkait dengan capaian dan realisasi, dari pagu alokasi anggaran yang tidak disampaikan oleh Pak Sekjen tadi 186.063.940.000. Nah, kalau kita *breakdown* per program yaitu nilai tambah dan daya saing, serta dukungan manajemen, di nilai tambah dan daya saing itu teralokasi anggaran sekitar 140,5 miliar dan dari dukungan manajemen 45,563 miliar. Dan kita coba *breakdown* dari pagu alokasi per jenis belanja, ada itu yaitu belanja pegawai, belanja personal, belanja prioritas dan nonprioritas. Dari belanja pegawai 24.518.210.000 realisasinya sudah, totalnya adalah 13,18%. Kemudian belanja operasional 6.290.000.000, kemudian proyek nasional 140.500.000.000, kemudian belanja nonprioritas 14.836.330.000 dan itu terdistribusi per unit eselon II yaitu Direktorat ILMATE 22,5 miliar, Direktorat IYT sekitar 33 miliar, Seditjen ILMATE 45,563 miliar, kemudian Direktorat IPAM 69,5 miliar dan Direktorat Logam 17,5 miliar.

Next. Realisasi anggaran sampai dengan Mei ini, dapat kami laporkan juga Pak Ketua, bahwa untuk di Direktorat Industri Alat Maritim itu 11,45%. Kemudian di elektronika dan telematika 6,37%, kemudian di sekretariat, di seditjen 33,30% dan industri permesinan alat pertanian 3,91% dan dari Direktur Industri Logam 11,96%.

KETUA RAPAT:

Mohon maaf ini kok nggak muncul ya.

SESDITJEN ILMATE KEMENPERIN RI (M. ARIFIN):

Next, Pak. Realisasi penyerapan anggaran kalau kita *breakdown* berdasarkan jenis belanja, mungkin itu *next slide*, lanjut, itu *next slide* tadi. Belanja pegawai, realisasi anggaran sampai saat ini sekitar 8,98M, belanja barang realisasi anggarannya sudah 15M dan belanja modal itu realisasi anggarannya masih nol tapi karena memang sedang dalam keadaan kontrak Pak, sekarang 31 kegiatan sudah pelaksanaan kontrak dan akan terealisasi.

Mungkin *next* saja, *next*. Nah, ini kami coba prognosa realisasi tahun 2022 ini, mungkin sampai akhir tahun nanti kami coba meng-*exercise* dari teman-teman yang ada di sektor itu anggarannya akan bisa terealisasi sekitar 97,65%. Ada beberapa tantangan yang terkait dengan capaian realisasi ini adalah pertama 31,63% itu adalah anggaran kami masih diblokir sekitar 66.248.753.000, termasuk juga di dalamnya adalah termasuk ada tambahan *adjustment* sekitar 7,4 miliar yang otomatis juga akan menjadi tantangan. Kemudian juga itu beberapa tantangan berarti atau kendala di dalam realisasi kita ini.

Next, next slide saja, kemudian dari program prioritas dapat juga kami sampaikan progresnya yaitu di IMC (Industri Manufaktur Center) itu pagu anggaran 50 miliar, sekitar 49,6 di sini itu adalah masih di dalam blokir. Kemudian juga program nasional IMEI kontrol juga ada pagu anggarannya 10 miliar. Kemudian juga *next* saja, nah IMC ini mungkin bisa kami sampaikan sedikit Pak, IMC ini nanti kan terdiri dari tiga kegiatan, ada teknologi *solution center*, *big data* analisis di dalamnya, kemudian juga ada manajemen *solution center*. Nah, kegiatan fisiknya sudah 15%, kemudian IMEI juga kegiatan fisiknya sudah sampai 12%.

Next. Di kegiatan lain yang juga program prioritas di Ditjen ILMATE ini progresnya bisa kami laporkan Pak Ketua, yaitu *pilot project* pengembangan model bisnis aplikasi...(suara tidak jelas)...yang pagu anggarannya sekitar 1 miliar. Kemudian juga penguatan industri ventilator dalam negeri yang pagu anggarannya 2,5 miliar. Nah, di kegiatan fisik yang terkait dengan proyek pengembangan model...(suara tidak jelas)...ini sudah 33,6%, termasuk juga penguatan industri ventilator dalam negeri di mana kegiatannya juga sudah mencapai 50%.

Next, kemudian juga ada kegiatan prioritas lain yang terkait dengan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai beserta ekosistemnya, dialokasikan anggaran 3,5 miliar. Di mana progres kegiatannya sudah mencapai lebih kurang 9,96% termasuk juga utilisasi industri berbasis sumber daya alam dengan pagu anggaran 3,5 miliar, kemudian kalau kita lihat dari segi kegiatan progresnya sudah mencapai 26,7%.

Nah, kemudian kegiatan lain yang juga bisa kami sampaikan Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua, serta Bapak/Ibu hadirin semuanya. Kebijakan pengembangan kemampuan industri kedirgantaraan, anggarannya juga dialokasi 2,5 miliar dengan progres kegiatannya sekitar 4,20%. Kemudian peta jalan industri baja nasional anggaran 1 miliar, progres kegiatannya 16,7%. Kebijakan pengembangan industri perkapalan anggarannya 2,5 miliar dan progres kegiatannya 23,90% termasuk juga evaluasi peningkatan utilisasi produk dan investasi sektor ILMATE anggarannya 1 miliar dan progres kegiatannya 25%. Juga terkait dengan kegiatan lain adalah neraca komoditas sektor industri permesinan, dan alat mesin pertanian dengan alokasi anggaran 1,5M, progres kegiatannya adalah 15%. Kemudian, juga kegiatan lain industri komponen yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur yang di alokasi anggarannya 7 miliar dengan progres kegiatan 23%. Kemudian, juga kegiatan

industri logam yang terafiliasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas alokasi anggarannya 4 miliar dengan progres kegiatan 12,08%. Kemudian, kegiatan industri besi baja yang terverifikasi kemampuannya dalam rangka pemenuhan data *supply demand* industri baja nasional anggarannya 3 miliar dan progres kegiatannya 6,61%. Termasuk juga ada kegiatan industri smelter logam bukan besi yang termonitor dan terevaluasi dan perkembangannya alokasi anggarannya 1,863M dengan program kegiatannya 12%.

Kemudian, kegiatan lain juga terkait dengan industri terakumulasi dan informasi yang terafiliasi dianggarkan 5M dengan progres kegiatan 25%. Kemudian, pengembangan *center of excellent* industri alat kesehatan anggarannya 5M dan progres kegiatannya adalah 20%. Kemudian kebijakan penggunaan produk dalam negeri sektor industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dengan anggaran 15M, program kegiatannya adalah 15%. Kemudian, investor yang terafiliasi dalam rangka pengembangan industri permesinan dan alat mesin pertanian dengan anggaran 3M dengan progres kegiatannya ada 20%. Serta industri yang terafiliasi melalui kerjasama internasional sektor ILMATE dialokasikannya anggarannya 1M dengan ...*(suara tidak jelas)*...60%.

Kemudian, industri yang terafiliasi dalam rangka peningkatan akses pasar dan pendampingan industri anggarannya 1,83M dengan progress kegiatan 30%. Kemudian industri yang terafiliasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor ILMATE dialokasikan anggarannya 2,25M dengan progres kegiatan 30%. Serta industri sektor elektronika yang terafiliasi menuju industri 4.0 melalui pendampingan dengan alokasi anggaran 6 miliar dengan progress kegiatannya adalah 30%, 32%. Kemudian adalah industri sektor otomotif yang terafiliasi menuju industri 4.0 melalui pendampingan dengan progress kegiatannya 4,3% dan alokasinya adalah 6,45M. Kemudian industri sector IPAM yang terafiliasi menuju industri 4.0 melalui pendampingan anggaran, dengan pendampingan sampai saat ini progress anggaran kegiatannya sudah 60% dan anggarannya 5,83%.

Kami kira itu Pak yang dapat kami laporkan terhadap capaian realisasi anggaran di Ditjen ILMATE, kami silahkan ke Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya, sudah semua disampaikan Pak Sekjen.

Oke, jadi begini, untuk selanjutnya akan didalami oleh yang terhormat Anggota Komisi VII. Dari Pimpinan saya memberi catatan bahwa ini adalah sebetulnya pelaporan kegiatan sampai satuan tiga. Jadi, ada kegiatannya dalam bentuk apa kalau dalam bentuk produk juga dalam bentuk barang dan jasa, lantas dengan anggaran berapa, maka bisa disimpulkan tingkat ketercapaiannya sekian persen. Tadi hanya target ini, ini, ini, ini sekian persen, ini saya kira menjadi catatan, sehingga angka-angka itu muncul tanpa perspektif, Pak. Daripada kita mau menjadi bahan evaluatif untuk selanjutnya

menjadi dasar kita nanti tahap pertama, pasti inikan baru 1 semester anggaran bisa untuk jadi catatan melanjutkan program.

Keduanya untuk penyusunan anggaran di tahun selanjutnya, sehingga program-program itu dengan sejumlah anggarannya apa, di anggap layak atau tidak layak. Jadi hari ini, ini adalah sebuah kegiatan yang sangat-sangat penting mestinya disampaikan dengan rincian-rincian sampai satuan tiga karena memang undangan kami menyebutkan bahwa ini pelaporan sampai satuan tiga. Saya kira itu catatan dari pimpinan.

Dilanjutkan dipersilakan yang terhormat untuk mendalami apa yang telah disampaikan dari Kementerian Perindustrian, yang tadi dari sekjen dan sejumlah direktorat jenderal. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan, yang terhormat Pak Bambang.

F-PDIP (BAMBANG DWI HARTONO):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII.
Yang saya hormati mitra kerja dari Kementerian Perindustrian.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, baik yang bersifat umum maupun teknis. Yang umum begini, ada nggak sih formula arahan dari Kementerian Keuangan atau Bappenas proporsi antara belanja rutin, gaji pegawai, pemeliharaan sarana prasarana dan belanja untuk pembangunan, ada nggak arahan? Karena dengan demikian kalau itu tidak dipenuhi ya tentu akhirnya berpengaruh kepada kinerja kementerian ini.

Yang kedua, persoalan blokir, apa upaya dari kementerian, para dirjen terkait dengan blokir ini. Tadi saya lihat ada yang persentasenya cukup besar. Nah, pasti mengganggu kinerja sehingga kalau kita, ini semester pertama ya, kuartal pertama nanti kita evaluasi ya tentu akan menyulitkan kalau blokir itu tidak segera ada penyelesaian.

Berikutnya ini aspirasi dapil, saya dari Dapil Jatim 1 Pak, Surabaya-Sidoarjo. Surabaya itu ada kampung ya itu memproduksi lontong, disebut kampung lontong. Jadi, kebutuhan lontong di Surabaya itu di-*supply* oleh kampung ini. Jadi, dulu itu kampung tempe kemudian berubah menjadi kampung lontong. Ada problem yang 3 masalah, yang pertama waktu itu salah menentukan kategori tarif gas, selesai, ini selesai, ini sudah selesai. Yang kedua, pengenaan PPS 11% ini sudah dibatalkan. Yang sampai hari ini belum diselesaikan adalah pengenaan jaminan untuk pembayaran bulan berikutnya. Jadi, kalau biasanya per orang itu industri lontong ini bayar 1 juta, lalu dengan tarif baru itu kena 2 juta, kalau kena denda berarti bayarnya 6 juta. Beberapa bulan lalu sempat terjadi keributan karena tiba-tiba saluran gasnya disegel.

Nah, pertanyaan saya, warga ini kan sudah dimediasi oleh Universitas Surabaya dengan PGN, tinggal satu persoalan ini. Apakah ada kemungkinan intervensi dari Kementerian Perindustrian untuk membantu kampung ini karena

kampung itu jadi hidup. Suami istri mengerjakan, nanti anaknya pulang sekolah mungkin membantu memasukkan beras, motong ini, sampai kira-kira jam 1 malam selesai. Jam 1 malam selesai, jam 2 pagi itu masuk ke pasar-pasar kecil. Artinya itu cukup menggairahkan di sektor usaha kecil dan warga kota.

Yang kedua, masalah pengawet. Saya sering menerima keluhan sosialisasi pemerintah terhadap para pengrajin, para pengelola industri kecil ini sudah faham tentang bahaya formalin. Tapi mereka ketika kita datangi lagi masih menggunakan formalin, alasannya Pak kami tahu ini nggak baik, ini nggak benar, tapi apa jalan keluarnya, apa pengawet yang murah dan ya semacam formalin itu, sehingga makanan ini tidak mengkhawatirkan konsumen.

Berikutnya adalah penggunaan zat warna untuk makanan, saya pikir ini sosialisasi juga sudah bagus, sudah sampai ke mungkin rumah tangga-rumah tangga tapi sekali lagi ya itu jalan keluarnya, apa penggantinya yang murah dan apa memberikan dampak baik terhadap produk makanannya.

Kemudian yang terakhir masalah tadi kebijakan *roadmap* baja misalnya, industri baja kita sudah jelaslah ya. Terus anggaran segitu itu untuk apa? Kadang-kadang yang, menurut saya kecil sekali untuk yang *roadmap* baja tadi dan lain-lainnya, mungkin bisa dirinci dan apa upaya kita untuk kemudian membuat industri kita ini bersainglah.

Terakhir di Surabaya itu ada BBI Pak, Boma Bisma Indra. Boma Bisma Indra ini salah satu produknya adalah mesin diesel. Tahun '70-an, '80-an mesin diesel kita mungkin di Asia, di Asia Tenggara mungkin menonjol bahkan di sana ada namanya PT Agrindo Perintis Industri Pertanian. Dulu industri pertanian PT Agrindo itu di-*supply* dengan dieselnnya BBI, sekarang kalau Bapak berkunjung ke industri-industri pertanian misalnya untuk sawah, itu mesin dieselnnya banyak yang bukan industri kita, sangat disayangkan.

Itu saja Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya Pak Bambang Dwi Hartono dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 1 Surabaya-Sukoharjo.

Betul memang, apakah ada nih persoalan anggaran kita yang anggaran rutin dan anggaran pembangunan secara keseluruhan. Kita khawatir betul nih Pak Sekjen dan yang lain, ada terjadi deindustrialisasi itu harus kita catat. Deindustrialisasi terlebih khusus, apakah ada upaya mencegah itu, khususnya industri manufaktur. Ini jangan sampai dalam struktur PDB kok saya lihat turun terus juga proporsinya, bayangkan industri itu kalau dicabut itu apa *Palm Oil* agak berat memang, kalau kita lihat dari di dalam APBN kita, dalam pendapatan kita.

Dilanjutkan dari Fraksi Golkar, ya tadi sudah dari ini Pak, Bambang DH sudah menyampaikan, apa putaran kedua kita lanjutkan?

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

1 menit, Ketua.

KETUA RAPAT:

1 menit nanti yang lain *meri* ini nanti irilah. Iya, ya coba betul-betul disiplin 1 menit Pak Gunhar, karena.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

1 menit, 1 menit, ini Bu, Bu, halo Bu, yang saya mau tanya tadi Ketua. Di perencanaan kegiatan dari 2022 ya, ini halaman 16 Bu, tadi Bu, wirausaha baru IKM. Itu ada bentuk pembangunan WUB industri kecil berbasis pondok pesantren di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang saya tanyakan kenapa nggak di luar Jawa Barat dan Jawa Timur Bu, kalau perlu usulan, kita akan usulkan, itu yang pertama.

Terus yang kedua Bu, berkaitan dengan bantuan wirausaha bagi industri kecil sama juga, di Palembang itu ada wirausaha bentuknya macam-macam, ada pempek, Bu. Kemarin waktu kita pelatihan juga begitu juga yang dibutuhkan itu sebetulnya bantuan, bantuan untuk wirausaha kecil itu berbentuk apa gitu loh, bukan hanya modal pelatihan aja.

Itu saja Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, ya ini masukan melengkapi. Betul, jadi sekaligus nanti ada program-program yang bisa di-*generate* selanjutnya.

Ya, dilanjutkan Fraksi Partai Golkar, Pak, lah ini Bambang lagi, ada Pak Bambang DH, ada Pak Bambang Pati.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Memang Bambang ini lagi hits, Ketua.
Memang ada persatuan Bambang dunia.
4, kami mungkin akan mengusulkan poksi Bambang, nanti.

Baik.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera untuk semua.

Yang kami hormati Pimpinan beserta Anggota Komisi VII kemudian juga Pak Sekjen beserta para dirjen dari Kementerian Perindustrian.

Tadi kami sudah mendengar paparan, saya pikir sudah cukup baik, jelas. Mungkin sedikit pendalaman saja, yang pertama kepada Pak Sekjen sebetulnya kurang lebih seperti ditanyakan tadi dengan rekan kami Pak Bambang yang dari PDIP. Mengenai persoalan pagu yang diblokir ini Pak, ya kan. Nah, kita kan melihat bahwa perindustrian ini dari data yang disajikan ini berkontribusi kepada produk domestik bruto regional, produk domestik bruto kita nasional itu 18,8%. Jadi, ini kan sesuatu yang memang terukur. Nah, ketika misalkan pagu ini diblokir mungkin bisa dijelaskan sekilas saja, yang diblokir itu sebetulnya apa masalahnya. Nah, kemudian kembali ke yang disampaikan tadi upayanya apa untuk kemudian Bapak bisa membuka blokir tersebut.

Nah, terkait dengan itu, ini kan beberapa kementerian menjadi mitra daripada Komisi VII ini adalah sumber PNBPN, seperti misalkan Kementerian ESDM. Saya yakin juga Kemenperin ini juga salah satu sumber PNBPN kita juga, jangan sampai Pak gara-gara blokir-blokir seperti ini mempengaruhi kepada penerimaan negara. Nah, ini harus kita *exercise*. Nah, kami perlu masukan-masukan yang seperti itu bagaimana untuk mengakselerasikan kinerja daripada Kementerian Perindustrian, khususnya kepada fiskal dan juga kepada ekonomi sektor riil, seperti itu.

Kemudian, lanjut kepada Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, ini kan sudah melaksanakan beberapa program ya Bu ya, kemarin juga sudah sempat dilakukan kegiatan pelatihan di Bangka, saya terima kasih. Hal seperti ini kami pikir betul-betul merupakan jawaban, bagaimana kita mendorong pergerakan ekonomi bawah. Nah, kita melihat bahwa ekonomi Indonesia ini kan bangkit di tahun 2022 ini dan kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan itu menurut saya harus lebih masif lagi kan seperti itu, sehingga yang namanya peningkatan populasi IKM melalui kewirausahaan, kemudian penguatan melalui peningkatan daya saing dan sebagainya ini diteruskan saja, seperti itu.

Nah, cuman begini terkait dengan beberapa produk-produk yang dihasilkan IKM industri kecil menengah ini kan ada SNI-nya nih. Nah, ini saya lihat ini Badan Standar Nasional BSN ini belum di bawah Kementerian Perindustrian ya, dia lembaga tersendiri, oh tidak di bawah ya? Tetapi belum merupakan kemitraan daripada kita ya Pimpinan? Belum kemitraan daripada Komisi VII ya? Badan Standarisasi Nasional, Badan Sertifikasi ya? Nah itu harusnya di kita itu Pimpinan, kita usulkan itu karena kenapa? Bagaimana kita mengakselerasikan ya kan produk-produk Indonesia yang sinergi dengan kita. Masa kementerian teknisnya ada di sini, tetapi untuk standarisasinya di tempat lain. Nah, ini harus kita usulkan, ini bukan persoalan apa ya, tetapi hal yang sangat strategis, sehingga kita *linier* membahas ini tuntas seperti itu.

Kemudian, lanjut kepada Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) ya. Pak, beberapa bulan yang lalu itu dengan Dirjen Minerba kita juga ada membahas tentang *roadmap* hilirisasi pertambangan. Nah, ini saya ingin tanya progresnya seperti apa Pak? Karena kemarin itu pembahasan kita, Pak Dirjen Minerba dan Dirjen ILMATE mengatakan kita

akan bahas secara periodik sampai di akhir tahun ini ketok, ada *roadmap*-nya tapi kan tentu ini terkait dengan memang diagendakan nggak nih kegiatannya, kan seperti itu Pak, ingin tahu aja Pak.

Kemudian, lanjut kepada Dirjen Agro, kemarin cukup ramai persoalan sawit Pak ya, minyak goreng. Kemarin sistem Simira itu penganggarannya dari Kementerian Perindustrian atau Kementerian Perdagangan Pak, yang Bapak kemarin *develope* itu Pak? Interaktif ya Pak.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI:

Dari kami Pak.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Oh ya, jadi begitu sekarang diambil, dioper ke Kementerian Perdagangan apakah di bawah kendali Bapak atau Kementerian Perdagangan nantinya, Simira ini.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI:

Mohon izin, Ketua. Jadi Simira ini tetap di Perindustrian Pak. Jadi, kita mendukung program minyak goreng rakyat, jadi tetap, kita kembangkan malah lebih luas lagi cakupannya. Ya kalau kemarin itu dari produsen sampai dengan pengecer itu istilahnya, sekarang itu dari CPO sampai dengan transaksi konsumen, Pak.

Demikian Pak, terima kasih Pak.

F-PG (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Oke, baik saya pikir begitu Pimpinan.

Atas waktu dan kesempatannya, yang saya ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sehat semua.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Bambang dari Golkar, dilanjutkan dari Fraksi Gerindra.

F-GERINDRA (R. WULANSARI):

Izin *skip* Gerindra, Ketua. Berhubung nama saya bukan Bambang, kali ini Bambang, *skip* Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini kok, kaya jadi anak penyamun disarang perawan, di antara Bambang-Bambang ini.

Ya dipersilakan dilanjutkan Fraksi Partai Nasdem, ada kakak Rico Sia. Dipersilakan yang terhormat.

F-NASDEM (RICO SIA):

Terima kasih, Pimpinan.

Terima kasih, untuk rekan-rekan, baik yang hadir secara fisik maupun *virtual*.

Terima kasih untuk paparannya kepada Pak Sekjen beserta semua jajaran dari dirjen-dirjen maupun yang mewakili.

Saya hanya 2, mungkin yang pertama, tadi yang lain sudah disampaikan oleh kedua rekan kami Pak Bambang. Mungkin saya nanti nama saya Bambang Rico setelah ini. Ya saya ingin terdaftar di dalam Bambang sedunia.

Pak Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, saya minta jawaban sedikit, izin interaktif, Pimpinan. Tadi dikatakan bahwa dalam paparan ada angka 9 miliar yang ingin ditenderkan tapi karena diblokir 400 juta, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Pertanyaan adalah kan ada 8,6 di situ kenapa tidak sambil berjalan karena itu kan yang 400 itu hanya sebagian kecil yang bisa kemudian direalisasikan di akhir. Mungkin bukan hanya ke Pak Dirjen IA (Industri Agro) tapi mungkin yang akan menjawab Pak Dirjen karena Pak Dirjen yang mengangkat masalah itu.

Menurut saya itu bisa tetap dilaksanakan Pak, walaupun tentunya 400 juta itu sangat mempengaruhi, tapi kan bisa saja dia ditaruh di akhir nanti kalau misalnya terkait dengan penyediaan barang dan jasa, mohon penjelasannya.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI:

Izin Pak Ketua, terima kasih Pak Rico yang saya hormati.

Assalammu'alaikum.

Jadi 400 juta ini adalah manajemen pengelolaannya Pak, jadi di dalam restrukturisasi permesinan itu ada manajemen pengelolaan yang mulai mengumpulkan pesertanya, terus menyiapkan di awal sampai dengan survei terakhir, Pak. Jadi kalau pengelolanya ini belum bisa, belum ada jadi yang 9M ini belum bisa digerakkan Pak, demikian posisinya. Jadi nggak, jadi memang dia yang akan *me-manage* program ini.

Demikian Pak Rico, mudah-mudahan memberikan.

KETUA RAPAT:

Iya, jadi yang mau mengelola yang belum ada, barangnya bisa diadakan tetapi yang mau, yang bertanggung jawab mengelola yang belum ada maksudnya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Iya, jadi yang mengelola belum ada tapi ini kan masalahnya uang yang diblokir Pak, bukan masalah di pengelolaan, pengelola yang belum ada.

DIRJEN INDUSTRI AGRO KEMENPERIN RI:

Mohon izin mungkin tadi kami kurang, jadi untuk menjalankan restrukturisasi ini. Nah, restrukturisasi ini dikelola oleh manajemen ini Pak, jadi manajemen ini yang akan mengelola mulai dari identifikasi, terus mendaftarkan mesin peralatan apa yang akan diadakan, nah setelah itu perusahaan mengadakan mesin peralatannya, setelah itu baru dikasih tadi biaya-biaya yang memang terkait dengan itu Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik, apa kira-kira upaya Bapak karena ini kunci pertama ya Pak ya. Kunci pertama sehingga yang 9 bisa jalan, tapi kalau ini diblokir maka yang 9 nggak bisa jalan. Berarti di sini kan ada politik anggaran namanya, ada yang bermain supaya yang 9 jangan jalan dulu, tapi dengan tidak bilang 9 nggak bisa jalan, hanya bilang 400 diblokir dulu. Artinya semuanya akhirnya nggak bisa jalan, kan.

Oke itu saja mungkin dibutuhkan upaya yang luar biasa Pak untuk agar ini bisa jalan walaupun angkanya kalau dibilang dari keseluruhan ya cukup kecil. Tapi dengan diblokirnya 400 tadi akhirnya nggak bisa jalan ini udah politik anggaran namanya, supaya enggak bisa jalan.

Terima kasih.

Yang berikut mungkin ke Ibu Dirjen IKMA. Ibu terima kasih kegiatan, mungkin salah satu kegiatan yang sudah berjalan di Papua Barat, sudah berjalan semua dengan baik. Tadi terkait dengan paparan Ibu dana Dekon tahun 2000 untuk yang berikutnya saya harap, untuk dapil saya karena yang menyelenggarakan di sana itu mereka kewalahan dengan biaya kemahalan terkait dengan transportasi dan lain-lainnya, mungkin yang berikut diperjuangkan agak bisa sedikit lebih besar, tidak banyak, sedikit lebih besar karena berbagai faktor di sana yang kemudian membuat mereka sedikit kewalahan karena begitu luasnya wilayah tersebut. Sehingga contohnya harus naik pesawat, harus ada yang pakai tadinya biaya transportasinya yang dianggarkan misalnya cuma 10 juta, totalnya jadi 40 juta akibat tadi mungkin lewat laut, sewa *speed*-nya mahal dan lain sebagainya.

Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, dilanjutkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa PKB, ya Gus Syaikhul Islam, dipersilakan.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Sekjen beserta jajarannya.

Saya enggak akan panjang lebar karena ini akan kita perdalam di konsinyering, betul Pak. Ya cuma ini aja, ini terkait dengan realisasi ya, rendahnya realisasi serapan anggaran yang nomor 60 dari 85 KL itu menurut saya itu aja Pak yang perlu kita *highlight*. Jadi, itu kalau kita lomba lari itu berarti kira-kira urutan apa ya rombongan paling terakhir dan kita berharap bahwa mitra-mitra kita ini adalah mitra-mitra yang gesitlah karena bagaimanapun ini juga berkaitan dengan kitalah. Jadi, kalau serapannya rendah kira-kira kan kerjanya kurang *trennginas*, gitu yang kena juga Komisi VII juga karena jadi mitra.

Jadi, saya berharap bahwa ini forum dengan Pak Sekjen karena mungkin kalau untuk pendalaman setiap ditjen nanti di konsinyering. Ini aja yang kita harapkan adanya cepatan realisasi dan di sini ada disebut langkah-langkah untuk mempercepat itu, saya kira sudah cukup, yang penting dilaksanakan gitu kan. Itu saja saya kira Pimpinan, nanti kita perdalam di konsinyering.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Syaikhul Islam dari Fraksi PKB.

Dilanjutkan Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ijin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh Pak yang terhormat Pak Nasir, dipersilahkan, Pak Nasir.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII.

Yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi VII.

Saudara Sekjen dan seluruh jajarannya Kementerian Perindustrian.

Mungkin saya ingin meluruskan saja yang kita bahas hari ini kan kita ingin melihat satuan tiga, di sini satuan tiga ini kan harusnya sudah terinci nama barang yang dibeli apa, lokasinya di mana. Nah, ini kok nggak ada di sini. Namanya satuan tiga itu kan harusnya jelas Pak, barang mesinnya apa, programnya apa, berapa orang yang dikelola. Ini nggak ada satu pun saya lihat. Jadi, kita nggak tahu nih programnya apa gitu.

Izin Pimpinan mungkin saya interaktif ke Pak Sekjen, gimana Pak Sekjen? Anda kan tahu, anda sudah berapa tahun jadi sekjen kan, harusnya kan satuan tiga ini kan jelas kita bacanya. Saya tadi bingung nama barangnya nggak ada, harga barangnya nggak ada, jumlah barangnya nggak ada, itu namanya satuan tiga. Terus lokasinya di mana saja gitu loh. Makanya sampai ini hari, saya nggak mau nerima program dari kementerian ini karena saya nggak tahu gitu. Namanya perindustrian terus penyuluhan apa, ada anggaran yang 600 tapi tidak membelikan barang. Saya nggak ngerti programnya apa gitu, pakai EO, apa tujuannya di mana gitu, masyarakat industri kecil itu membutuhkan bahan, alat bantu untuk meningkatkan industrinya supaya lebih baik, gitu. Tapi saya dengar dari staf saya, industri yang diserahkan programnya nggak nyambung dengan yang mau kita bawa ke dapil. Sosialisasi-sosialisasi 600 juta ini buat apa gitu. Nah, di sini saya lihat nggak ada ini lampirannya.

Ini Pimpinan kita kan ingin melihat kan posisinya supaya kita tahu program ini azaz manfaat dari anggaran tadi apa gitu. Tadi seperti Menteri Keuangan blokir gitu, karena mungkin yang diminta Menteri Keuangan itu nggak nyambung dengan yang Bapak jelaskan, makanya diblokir. Kayak beli tanah tadi, kita nggak pernah menyetujui pembelian tanah sampai hari ini, ini ada pembelian tanah lagi. Nah, kita minta Pak, azaz manfaat dari anggaran ini kayak Dirjen Agro, kita udah pusing liat impor gula rafinasi ini seperti apa ini, malah sekarang mantan staf kementerian ini yang jadi ketua asosiasinya kan bingung juga kita, permainannya seperti menggeliat di situ semua, bagi kota-kota gula ini, itu juga pakai sosialisasi tadi saya lihat semua anggarannya. Seperti tadi perbaikan mesin-mesin industri gitu, nah kita tahu, harus tahu pabrik mana yang diperbaiki, seperti apa bentuk barangnya, harus *clear* gitu loh, kalau nggak kan nggak tahu kita ini barangnya apa, pabrik yang mana yang diperbaiki gitu, mungkin di daerah teman-teman yang lain ada yang harus diperbaiki, ini yang diprioritaskan utama. Kalau nggak, ngapain kita setuju anggaran ini, nanti di pembahasan 2023 kita cabut anggarannya ngapain, kita serahkan saja ke Kementerian ESDM, jauh lebih baik manfaatnya. Kita bisa bawa *converter kit* gitu loh, nggak ada manfaatnya Pak Sekjen. Anda pikir ini uang anda sendiri pribadi-pribadi, nggak, ini uang kepentingan buat masyarakat yang harus kita dorong. Kita minta satuan tiganya mana satuan tiganya ini, nama barangnya yang kalian siapkan di sini untuk diserahkan kepada masyarakat, ini dijelaskan mana barangnya.

Satuan tiga itu menjelaskan detail, beli AC pun kita harus tahu berapa harganya, beli pulpen pun kita harus tahu berapa harganya, ini nggak ada di sini. Anda tahu nggak Pak Sekjen anggaran satuan tiga yang diminta itu, mana rinciannya coba, kenapa nggak diberikan. Hari ini jadwal yang mau kita bahas itu ini per dirjen, mana? Loh kita sekarang bingung teman-teman, nggak ada program yang kita bawa ke daerah, ngapain kita setujuin coba. Coba Pak Sekjen jelaskan dulu, saya minta anggaran satuan tiga yang ada nama barang-barangnya mana datanya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Untuk satuan tiga B-nya mungkin yang detail itu tiga B-nya Pak. Satuan tiga B nanti akan kita bahas di konsinyering biasanya seperti itu Pak, sampai ke bawahnya, ini secara garis besar mungkin di sini tapi itu ada semua ya.

Lalu tadi Bapak Nasir yang terhormat.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Kenapa nggak diserahkan hari ini Pak, untuk dibahas nanti di konsinyering?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Sudah Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Mana satuan tiganya nggak ada, sampai sekarang nggak ada ini, kita baca ini tadi saya bolak-balik baca, nama barang nggak ada, berapa jumlah *quantity*-nya, mana barangnya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Formatnya seperti ini Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya ini sama saya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Formatnya seperti ini.

Ya tapi nggak ada unit dan nama barangnya nggak ada, barang berapa Bapak beli, apa nama mesinnya, berapa harganya, nggak ada di sini.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Biasanya nanti dibahas di satuan tiga B.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya diserahkan saja sekarang, kita bacanya di sini Pak, ini kan kita minta satuan tiga ini, nanti kita bahas di konsinyering baru tinggal pendalamannya.

Mungkin itu Pimpinan, jadi kita biar paham di sini bahan apa sih, yang apa sih realisasi anggaran yang direalisasikan oleh kementerian ini karena namanya Kementerian Perindustrian tapi nggak jelas apa yang mau kita bawa ke daerah pun kita nggak tahu. Kita tanya ada ini yang 600, 600, 600, saya bilang, sosialisasi, sosialisasi apa? Kita tanya industri apa yang bisa kita dorong ke sana, sosialisasi Pak, sosialisasi untuk apa gitu. Perusahaan yang industri itu udah pasti paham dia, kita inginkan barang kasih ke masyarakat, barang itu bisa bermanfaat gitu loh, kalau nggak percuma Pak Sekjen, nggak ada gunanya ini anggaran kita serahin ke Bapak.

Itu temen-temen Komisi VII ini akan mengalihkan anggaran bagus ke Kementerian ESDM, nggak perlu kita kasih cuman untuk gaji doang aja, ngapain kita serahkan kalau begini datanya. Nggak tahu kita membaca sampai ini hari, saya bertanya tadi itu kenapa ya Kementerian Keuangan, gampang Kementerian Keuangan itu gampang, ada temuan BPKP lagi tadi, *clear* jadi di BPKP itu masih meminta pertanggungjawaban atas pengadaan tadi. Nah, itu yang jadi catatan Menteri Keuangan makanya diblokir.

KETUA RAPAT:

Oke, saya kira. Iya saya melihat memang mungkin tadi pengungkapannya kurang runtut dan kurang menjelaskan, ada data lampiran-lampiran itu juga perlu menjadi bahan yang juga. Makanya tadi baca itu baca, betul-betul baca angka kayak baca gitu loh, jadi tidak, *involvement* gitu. Ini juga mencerminkan bahwa mohon maaf ya, bahwa karena Pak Sekjen, Sekretaris Ditjen itu lantas bacanya kayak nggak *involved*, begitu. Padahal sebetulnya bisa menjelaskan berpatok dengan tentang data pendukung ini kan ada juga, mestinya itulah yang menjadi juga pengungkapan-pengungkapan secara baik.

Jadi, memang ini berkaitan semua, kalau masih ada silakan lanjutkan Pak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nggak Pimpinan, kita ini kan mau membahas bagaimana regulasi anggaran ini bisa kita manfaatkan buat daerah kita. Nah, ini sekarang kan kita nggak paham Pak Sekjen, anda berapa lama menyiapkan data ini satuan tiga yang, pokoknya beli AC berapa unit, beli tadi mesin-mesin berapa unit, lokasinya di mana, siapa yang terima, mana datanya?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Kalau yang tadi Pak Nasir sampaikan itu ada kegiatan yang ada di industri kecil, kita sudah menyiapkan itu program biasanya setahun sebelumnya, tapi kalau untuk.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Pak Sekjen, Anda kalau nggak bisa jadi sekjen keluar aja, yang saya tanya aja yang Anda jawab. Anda jangan jelasin yang lain-lain gitu loh, Anda sebagai sekjen mengatur semua dirjen-dirjen ini gitu loh, Anda yang saya tanya aja yang jawab gitu loh, pusing juga kepala saya jadinya.

KETUA RAPAT:

Oke, yang terhormat jadi coba dengan juga tetap bisa disampaikan secara baik dalam forum.

Silakan Pak Sekjen.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Kalau nggak keluarin aja sekjen ini, nggak ngerti juga tadi yang ditanya, macam mana sih ya.

KETUA RAPAT:

Ya dipersilakan, dilanjutkan penjelasannya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Jadi, kegiatan program yang terutama dilakukan kawan-kawan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Pak, yang saya tanya, kegiatan yang dibelanjakan atas tender mana nama barang-barangnya, ke mana lokasinya, mana datanya. Itu yang saya tanya sekarang, mana datanya dari semua dirjen ini, mana data penyelenggaraan barang maupun pengadaan barang, mana datanya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Iya kalau pengadaan barang masing-masing di eselon I itu bertanggung jawab.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya mana barangnya, datanya mana.

KETUA RAPAT:

Begini, begini mungkin bisa dibantu bagi misalnya satu-satu, soal pengadaan barang misalkan, apakah di dirjen, Direktorat Agro ada pengadaan barang, tentang barang apa dan dilaksanakan kapan, *volume*-nya berapa? Nah itu yang diminta Pak Nasir begitu. Demikian juga di Dirjen Industri.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Yang proses lelang tadi.

KETUA RAPAT:

Dan lelang kapan atau apa tender apa, mungkin itu, saya menjembatani, begitu Pak Nasir ya.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, betul, betul, proses lelang itu apa isinya, mana kalau orang berapa orangnya, di mana daerahnya. Kalau barang, mana barangnya, berapa harganya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Jadi, kalau untuk proses lelang semua Pak Nasir, di sistem itu ada namanya sistem.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ini nggak nyambung ya saya tanya, saya minta data. Data proses lelang yang Anda gunakan isinya mana, isinya yang saya tanya, isinya. Isi barang yang dilelang itu mana, harga satuannya berapa, tujuannya ke mana. Mana?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI:

Iya itu masing-masing di direktorat jenderal.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Iya, mana datanya?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Tadi Pak Ketua, sudah menyampaikan untuk masing-masing eselon I yang menyampaikan ya. Kita coba mulai dengan Pak Putu di Dirjen Agro ada atau tidak, nanti Pak Abdullah dari Sesditjen IKFT.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Anda ini kan sebagai Sekjen Pak, harusnya kan data yang mau kita bahas di sini kan harusnya sudah lengkap di sini. Anda itu sekjen loh, tahu

nggak fungsi jabatan anda di situ, sekjen. Mengkoordinasikan dengan seluruh dirjen-dirjen ini gitu loh, kok sekarang, saya tahu ini tadi nggak ada yang baca. Saya cek datanya juga nggak ada, mana datanya saya tanya. Satuan tiga itu Pak, pulpen dicantumkan di sini, pulpen Bapak beli, di sekjen tadi banyak anggaran itu. Anda itu nggak menampilkan ini, mana coba, di tempat anda aja nggak ada, jangankan ditempat dirjen yang lain. Punya Anda mana coba? Anda ngomong yang lain lagi, punya Anda aja nggak beres.

Saya minta skor dulu Pimpinan, ini datanya mana gitu. Jadi, sebelum konsinyering teman-teman ini udah bahas ini. Jadi, biar *clear* gitu loh. Orang udah minta satuan tiga kok nggak dikasih, gimana sih? Kan hari ini rapatnya membahas satuan tiga, mana datanya? Anda bilang yang lain, Anda aja nggak punya datanya, udah saya baca kok nggak ada barangnya. Anda kan banyak keperluan kantor yang Anda dibelanjakan itu, mana barangnya, mana harganya. Iya mana, yang saya tanya mana datanya.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Nanti kita segera siapkan kalau Bapak.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Sekarang, orang ini kita rapat di hari ini bahas ini kok.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Tapi kita belum menyiapkan sampai sedetail itu, Bapak.

F-PDIP (dr. RIBKA TJIPTANING PROLETARIYATI, A.AK.):

Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan boleh usul.

Situasinya jadi seperti ini, muter-muter aja, Pak Nasir tetap pada pendiriannya. Saya rasa betul karena ini kita rapatnya masalah kaitannya dengan anggaran, sekjennya juga belum siap, sepertinya saya lihat anggaran di kesekjenan aja beliau masih bingung apalagi dari dirjen-dirjennya, memang biasanya sekjen itu tahu anggaran di direktoratnya masing-masing.

Saya juga baru bingung nih lihatnya. Saya rasa memang diskors dulu aja daripada nanti nggak terjawab-terjawab ini.

Terima kasih, Pimpinan.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Pimpinan, Pimpinan sebelah kiri.

KETUA RAPAT:

Oh Pak Menteri dipersilakan yang terhormat Pak Menteri.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Saya pikir Mbak, diterusin dulu, saya nungguin ini dari pagi mau ngomong nih. Jadi, jangan setiap ada Pak Nasir kita skors, tiap ada Pak Nasir, itu usulan boleh saja tapi yang lain mau berbicara. Saya mau bicara dari sisi yang lain ya, tolong didengarkan juga gitu.

KETUA RAPAT:

Betul sekali ini kewenangan masing-masing, hak masing-masing fraksi.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Saya setuju aja nanti dibahas detail, silakan aja tapi saya akan membahas dari sisi lain lagi terkait anggaran.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya kita belum memutuskan antara diskors atau tidak diskors, tapi kalau ada masukan dan sebagainya.

Masih Pak Nasir?

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ini cuma minta datanya ini aja, karena kalau nggak ada datanya percuma rapat hari ini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang terhormat Pak Nasir.

Jadi menjadi catatan keras itu persis catatan saya yang pertama Pak, ini mohon maaf sekali lagi. Kita memerlukan *involvement*, kelihatan kok Bapak tuh baca datar semua gitu, jadi saya akui Ibu Dirjen jauh lebih *involve* gitu misalnya begitu karena memang secara rinci ya karena tadi disampaikan oleh Pak Putu ya. Pak Putu *oke* tapi pusing dengan urusan minyak ya, jadi agak repot memang. Nah itulah, nah ini menjadi perhatian, satuan tiga itu betul kata Pak Nasir barangnya itu sudah berwujud apa, sehingga bisa disimpulkan bahwa tingkat keberhasilannya sekian persen itu karena memang ada yang dilakukan kan begitu, tidak untuk apa-apa. Kita memang justru di situlah kita fungsi pengawasan yang selanjutnya kita akan tingkatkan nanti di pembahasan selanjutnya untuk menjadi dasar penyusunan di APBN tahun 2023 kan begitu.

Baiklah dilanjutkan setelah dari Fraksi Partai Demokrat, Pak Tif yang terhormat dari PKS, dipersilakan.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Gadis Bandung berkerudung coklat.
Biar mendung tetap semangat.
Lewat Mampang terus ke Bekasi.
Memang ada apa sih.

Jadi terima kasih semuanya atas prestasi yang diberikan, memang catatan Pak Ketua tadi kalau istilahnya Pak Ketua tadi yang membaca tuh nggak terasa ruhnya itu. Istilahnya tadi apa *involve* ya, kurang menjiwai kali ya, mungkin belajar pantun sama saya boleh Pak nanti di, supaya lebih.

Yang pertama adalah rendahnya serapan, itu secara total disampaikan di laporan sekjen ini secara menyeluruh ya Pak itu 26,26% ini rendah Pak. Bayangan saya atau paling idealnya adalah sekitar 40% sampai hari ini.

Jadi, ini Pak Sekjen dan teman-teman semua rekan dari Perindustrian dan sekjen dan eselon I semuanya, bahwa ini berakibat kepada efek, berefek kepada ekonomi nasional. Jadi, secara ekonomi makro *government spending* itu, itu sangat berpengaruh nanti kepada proses peningkatan PDB kita. *Trigger*-nya di situ Pak ya, jadi PDB itu adalah *umbrella* terhadap ekonomi nasional, termasuk juga *global trust* kepada kalau PDB kita bagus, tentu negara-negara lain, baik juga yang mau berdagang, baik juga yang mau berinvestasi mereka punya *trust* gitu loh Pak, punya satu angka pegangan gitu. Ini secara ekonomi makro, kalau di bawahnya juga tadi Pak Nasir juga ini sudah, ini apa, di bawah nggak bergerak Pak. Bapak nggak membelanjakan uang berarti hebat itu bukan, jadi yang di bawah nih nggak gerak ya seret paling nggak industri rakyat, rumah makan, hotel apalagi bahan-bahan baku dasar. Kan aliran darahnya di-stop gitu loh, jadi *budget* apa, *government budget spending*-nya itu adalah untuk mengalirkan darah itu, kalau darah enggak dialirkan *stroke* nanti Pak, negaranya *stroke* bukan orang lagi, itu yang pertama.

Kalau ada masalah misalnya tadi, Pak Nasir juga udah singgung ya mungkin *auto* apa tadi *adjustment* ya, apa tadi istilahnya *automatic adjustment*. Itu semuanya kena Pak, semuanya kena, saya kira juga semua kementerian, KL, MPR-DPR juga itu kena Pak, ada yang dipotong, kita ini ada yang mau kunjungan 5 tahun sekali itu saya denger tuh dihapuskan, di *delete*-lah. Dan tadi ada catatan di halaman berapa laporan Pak Sekjen tadi, nggak ada halamannya lagi ya. Jadi, dianalisis rendahnya serapan itu misalnya, ini kan ada disebabkan oleh adanya review BPKP. BPKP ini berarti audit apa, masalah *auditing* kan Pak ya, ya auditnya ini diselesaikan. Irjenya mana nih nggak hadir ya Pak, oh nanti siang.

Jadi, dengan Irjen ini, Irjen harus meng-*guidance* semua eselon I untuk menyelesaikan hal ini gitu ya. Jadi jangan, BPKP itu kan internal pemerintah

sebetulnya, bisa didialogkan, bisa dibicarakan. Mereka cuma melihat secara prosedur nih layak nggak gitu, ini laporan keuangan yang Bapak sampaikan itu. Itu masalahnya diselesaikan jangan dibiarkan, itu yang pertama.

Yang kedua adalah tadi juga masalah validitas informasi Pak atau data ini, ini ada beberapa yang saya baca tadi laporannya inkonsistensi data maupun angka, termasuk sekjen sendiri. Sekjen sendiri di *summary*-nya ini yang di sini Pak, rapat dengan ini yang, menuliskan 26,83% ya tapi Bapak di halaman 15-nya coba dilihat Pak halaman 15, itu di laporan sekjen angkanya 28,3% Pak gitu, bahkan ditulisnya apa ini, tahunnya kurva itu Pak, tolong dilihat Pak. Tahunnya kurva itu 2020, itu *copypaste* kurva tahun 2020 atau *tercopypaste* 2020-nya, kan udah tahun 2022 Pak, 2 tahun yang silam itu Pak, belum ada Covid waktu itu, udah ada ya.

Jadi, itu inkonsistensi data yang ini bukan satu nih, di Dirjen IA juga ini. Saya hitung-hitung di halaman 4 ini Pak, laporan yang Bapak sampaikan tadi, Agro ini ya. Ini halaman 4 itu 17,53% Pak, tapi dituliskannya di kurva itu 19%, di sini di laporan sekjen 16,27% ini yang benar yang mana ini ya. Tolong dijelaskan nanti, tolong dibaca Pak, Bapak jangan, ini eselon berapa yang menyusun laporannya.

Jadi, Bapak sebagai apa, kalau orang lain yang bawahan Bapak yang membuat laporan Bapak bertanggung jawab untuk validitasnya, konsistensinya, mengkoreksinya, jangan dibiarkan begitu udah dibaca kan itu tadi mungkin Pak Ketua bilang, ini nggak ada ruhnya ini gitu, kan terasa kalau dia menguasai dan dia paham, ada kembang-kembangnya dikit gitu, Pak Ketua.

Ya terus di Ditjen IKFT juga begitu, di halaman 6 laporan Anda mencantumkan 21,32%, di sini di laporan menyeluruh tadi sekjen ini 20,74%. Saya ini orang informatif Pak, jadi angka-angka ini penting 1%, 2% ini besar Pak ya, dari berapa dulu kan gitu ceritanya. Jadi, dirjen dan eselon I mengkoreksi ini, jangan kemudian terburu-buru apa tadi nggak enak badan, ada juga di sini tadi saya lihat ada. Di samping, nggak enak badan, ada nggak enak hati juga saya tengok tadi Pak ya, ini kan hati ini dalam badan juga masalahnya kan.

Kemudian Pak yang ketiga, logika alur Pak Ketua ya. Ya, jadi misalnya Dirjen IKMA tadi itu ya Ibu ya, itu di situ dijelaskan mengenai industri prioritas nasional ya, ada *furniture*, industri aneka, sandang, kimia, elektronik, alas kaki ya, alas kaki ini sepatu apa bakiak? Sepatu ya? Jadi, gini logika alur kita bisa nggak, masalah-masalah kita yang disampaikan oleh IKFT apa? Kita impor garam 60%, ya sih katanya garam industri. Kenapa garam industri diimpor? Petani kita belum bisa, maksudnya disambung ini permasalahan kita di sini loh gitu, iya kan di garam. Ini yang dikembangkan kenapa garamnya nggak dikelola, secanggih apa sih mesin mengolah garam, garam kita tuh tersebar laut kita, pantai kita terpanjang di dunia Pak, pantai Indonesia nih terpanjang di dunia karena pulaunya aja 17.580 pulau itu dilihat dari satelit. Kalau Bapak nggak percaya hitung sendiri gitu ya. Jadi, ini banyak petani garam kita, kenapa kita impor garam 60% itu udah lama teriakkan itu. Tapi kenapa nggak disambung

logika, masalah kita yang gatal itu tangan kita Pak, kok yang digaruk kepala gitu kan. Sama aja ada beberapa pertemuan dengan Pak Menteri, 95% bahan baku obat kita impor dari luar, 60% dari Cina, 30% dari India, kenapa nggak ada poin-poin itu di sini gitu maksud saya gitu. Jadi, kita punya masalah ini yang dikerjakan yang lain gitu, itu pertanyaan silakan nanti dijelaskan. Paracetamol aja kita impor, ya nggak, di Cianjur itu ada istilah Pak, kalau air itu panas banget mau minum itu kata orangnya Pak, kasih Paracetamol aja nanti biar nggak panas banget karena es nggak ada.

Baik, itu saja Pak, cuman saya agak tergelitik sedikit Pak Ketua dari Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi Teknik dan Elektronika, bidang saya ini. *Recover together, recover stronger* ini, ini nggak umum gitu slogan gini Pak, kalau kita belajar-belajar dulu. Misalnya gini "*we will more stronger when we are together*", misalnya seperti itu ya. Kalau ini kan kayak pesimis gitu Pak, *recover together, recover stronger*. Seolah-olah kita tuh belum ada kebersamaan, oh G20 ya. Tapi sebetulnya yang umum itu adalah kita akan semakin kuat kalau kita bersama, dalam mengambil ini saya nggak tahu mungkin perlu dijelaskan mungkin punya filosofi tersendiri. Agak tergelitik saja kalau orang Kominfo lain lagi Pak, *we are more stronger when we are connected*, kita akan lebih kuat kalau kita tersambung.

Demikian Pak, dari ke Jeddah beli abaya, udah ya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Tifatul Sembiring tadi telah menyampaikan banyak hal sekali, terima kasih.

Disampaikan, diteruskan dari Fraksi Partai Amanat Nasional atau dari *virtual*, ternyata tidak. Kalau tidak ada, saya masih membuka kalau masih ada yang mau menyampaikan. Mbak yang terhormat Ibu Mulan Jamilah, Ibu Mulan, mau memanfaatkan kesempatan atau mau nyanyi.

F-GERINDRA (R. WULANSARI):

Nggak Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya ini ada tambahan dari fraksi, dari Pak Andi.

F-PDIP (H. ANDI RIDWAN WITTIRI, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Rekan-rekan Anggota Komisi VII.

Saya hanya mau menambahkan sedikit Pak, apa yang disampaikan senior kami Pak Tifatul. Bahwa Indonesia ini adalah pantai terpanjang di dunia yaitu benar, kebetulan di kampung saya Pak, di Sulawesi Selatan itu ya, tepatnya di Kabupaten Jeneponto. Itu adalah penghasil garam terbesar di Sulawesi, tapi sampai sekarang garamnya itu Pak tidak bisa dikomersilkan, artinya tidak bisa dipakai untuk masuk di supermarket dan apa segala. Sehingga, kalau kita berbicara tadi impor garam industri dari luar, ya kenapa kita tidak, jangan garamnya yang di impor Pak, teknologinya kita ambil. Sehingga, masyarakat yang ada di pesisir pantai ini bisa ada *value*-nya, ada tambahan nilai daripada garam itu. Otomatis kalau garam kita dalam negeri kita bisa konsumsi atau masuk kelompok industri yang bermanfaat saya rasa negara bisa pendapatannya makin banyak, masyarakat juga bisa menikmati hasilnya dengan maksimal.

Itu aja Pak masukan bahwa di Jeneponto itu Pak, sepanjang pesisir jalan sebelah kanan kalau kita arah ke Bulukumba itu. Jadi, dimulai dari Takalar, masuk itu Jeneponto sebelah kanan itu sampai di Bantaeng itu kita bisa lihat itu Pak garam di pinggir jalan itu berkarung-karung itu. Tapi itu garam bukan garam yang, bukan garam yang komersil, belum bisa mulai dikategorikan bahwa garam itu bisa masuk di market bebas, Pak.

Itu aja Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Pimpinan, mungkin tadi yang data itu bisa kita tunggu berapa lama nanti supaya kita, untuk dirjen yang berikutnya juga nanti kita bisa melakukan pendalaman nanti. Jadi, nanti mungkin ini diskor kita minta datanya, supaya kita paham aja apa barang-barang yang diselenggarakan oleh dirjen-dirjen ini.

Itu mungkin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya *oke*, jadi begini karena proses hari ini, setelah ini kan beliau menyampaikan apa yang jadi catatan. Tapi ada catatan keras bahwa data-data itu harus ada lengkap sampai satuan tiga.

Saya kira cukup ya, oh masih ada Ibu Roro silakan.

F-PG (DYAH RORO ESTI, W.P., B.A., M.Sc.):

Izin Ketua, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Pak Sugeng dan seluruh Anggota Komisi VII yang saya banggakan dan tentunya yang hadir mitra kerja kami dari Kementerian Perindustrian Pak Sekjen beserta seluruh dirjen yang hadir pada kesempatan hari ini, mulai dari Dirjen IKMA, Industri Agro, IKFT dan juga Dirjen ILMATE.

Saya ada beberapa tambahan, mohon maaf terlebih dahulu karena tadi saya ada beberapa kegiatan tapi saya simak dari *virtual*. Jadi, yang pertama untuk Dirjen IKFT, tadi saya baca di *slide* kalau tidak salah nomor 4 ya. Di *slide* nomor 4 yang menandai bahwasanya investasi sektor industri kimia, farmasi dan tekstil ini menambahkan juga apa yang telah disampaikan oleh Pak Tif ya bahwasanya saat ini nilai investasinya sebesar Rp6,44 triliun sedangkan targetnya kalau kami baca itu di kisaran 93,29 triliun. Jadi, kalau kita lihat ini sangat amat jauh dari target yang telah disampaikan, saya hanya ingin menanyakan kenapa gitu dan lalu kemudian bagaimana strategi pemerintah agar kita bisa meningkatkan nilai investasi, terutama di sektor IKFT ini berdasarkan target-target yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Itu yang pertama.

Lalu kemudian mungkin tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Tif ya, yang mengenai ketergantungan kita oleh hal-hal yang sifatnya impor gitu, sudah saatnya kita andal dalam hal ini dan mempunyai potensi besar sebetulnya untuk mengeksplor dan bahkan bagaimana kita juga bisa mandiri.

Lalu kemudian yang kedua untuk Dirjen ILMATE, salah satu program prioritasnya itu tidak jauh dari pengembangan daripada kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. *Electric vehicles* ini sangat amat hangat dibahas bukan hanya di Kementerian Perindustrian saja tapi Kementerian ESDM, lintas kementerian menurut saya dan kami juga mempunyai keprihatinan khusus terhadap pengembangan *electric vehicles* tersebut. Nah, maka saya ingin menanyakan karena telah disampaikan ada pagu anggaran 3,5M ya berdasarkan presentasi dari ILMATE tadi ada di *slide* nomor 15 kalau tidak salah, saya catat tadi seperti itu. Maka saya ingin menanyakan apakah ada *roadmap*-nya versi Kementerian Perindustrian, karena saya sih berharap bahwa nanti bisa kita integrasikan dengan Kementerian ESDM, lalu kemudian kementerian-kementerian lainnya agar *interconnected* gitu dan mitra kerja kami lainnya juga mempunyai *roadmap* yang sama. Jadi, bagaimana nanti kita bisa sinkronkan.

Lalu kemudian bagaimana sejauh ini dari Dirjen ILMATE-nya atau Kedirjenan ILMATE bagaimana koordinasi dengan tim konsorsium pengembangan baterai ifi yang saat ini pada dasarnya kalau tidak salah digagas oleh Kementerian BUMN. Ini saya, kami saya rasa butuh *update* terkait pengembangan tersebut.

Lalu yang terakhir untuk seluruh kementerian, mohon maaf untuk seluruh eselon I kementerian yang hadir pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan karena ini sesuatu hal yang selalu saya suarakan yaitu berkaitan dengan sosial ekonomi gitu karena dengan sektor perindustrian ini kita harus selalu mengedepankan bagaimana sistem ekonomi ataupun ekonomi berkelanjutan itu merupakan sesuatu hal yang kita dorong dan merupakan apa ya basis daripada bagaimana kita melaksanakan setiap kegiatan yang saat ini sedang berjalan. Nah, maka saya ingin menanyakan sejauhmana praktik daripada sektor ekonomi ini telah direalisasikan, lalu kemudian berapa alokasi anggaran yang selama ini diperuntukan terkhusus untuk hal tersebut karena kembali lagi ini tidak lepas dari bagaimana negara Indonesia juga *committed* untuk bisa merealisasikan *sustainable development goals*. Kami berharap bahwa pengurangan emisi karbon itu tidak hanya datang dari sektor energi saja misalnya ya yang merupakan 30% sendiri itu datang dari sektor energi, tapi saya rasa industri pun berkontribusi terhadap ini. Maka sudah waktunya kita juga mengedepankan praktik-praktik seperti ini yang menguntungkan tentunya untuk keberlanjutan dan lingkungan hidup kita ke depannya.

Terima kasih Pak Ketua.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Ibu Roro, jadi memang betul Pak Sekjen dan Pak Dirjen Perindustrian bahwa semua adalah *inline* dengan *zero emission* 2060. Jadi, termasuk industri kita tahu *climate change* itu bukan isapan jempol, jadi proporsi-proporsi termasuk, secara proporsional memang tidak hanya industri, ada kehutanan, ada juga *land use* atau pemanfaatan tanah, ada industri, ada transportasi dan energi, elektrik dan sebagainya. Ini menjadi perhatian kita, contoh ini Pak Sekjen ya, bagaimana kita, *smelter* kita membutuhkan kurang lebih ada 6 giga lagi yang bakal dibangun dan itu semua batu bara. Kita tahu batu bara itu membutuhkan 1 giga 4,2 ton batu bara setiap tahun. Kita bisa bayangkan emisi yang akan masuk di udara, sedangkan kita sepakat *zero emission* di tahun 2060.

Saya kira ini menjadi perhatian juga segala bentuk perencanaan industri juga termasuk di dalamnya adalah memperhatikan aspek *zero emission*. Saya kira itu apa yang digarisbawahi juga oleh yang terhormat Ibu Roro.

Saya kira itu ya cukup Bapak/Ibu sekalian, kita persilahkan Pak Sekjen dengan catatan tadi bahwa setelah ini harus ada data lengkap perihal tentang barang dan jasa satuan tiga, begitu Pak Nasir ya.

Dipersilakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Terima kasih banyak Bapak Ketua.

Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota Komisi VII lainnya.

Terima kasih catatan Bapak Ketua akan menjadi catatan penting buat kami dan *Insha* Allah kami lengkapi. Lalu hal-hal yang lain seperti apakah ada proporsi dari Kemenkeu? Selama ini tidak ada arahan proporsi Bapak, berdasarkan usulan kami. Selalu kami usulannya lebih dari yang kami indikatif, tapi pertanyaannya adalah pada saat pembahasan kita selalu mendapat lebih kecil dari apa yang kami usulkan.

Lalu terkait dengan blokir, kami memang sudah juga melakukan dengan pendekatan dengan BPKP Bapak dan selalu kita selalu siapkan, tetapi ada hal-hal memang yang belum bisa terpenuhi sehingga tetap tertunda juga. Tapi itu tetap kita berjuang Bapak seperti terakhir seperti yang EMC itu, kami coba untuk melakukan pendekatannya karena kami merasa penting bahwa *industrial manufacture center* itu menjadi hal penting bagi mendorong industri ke depannya dan itu menjadi pertanyaan teman-teman BPKP, tapi kami sedang menyiapkan untuk bisa terealisasi tahun ini tapi masih di dalam pembahasan, masih berjalan itu Bapak.

Terkait dengan untuk *roadmap*, memang kami di Kementerian Perindustrian tidak hanya *roadmap* baja saja Bapak. Kami coba untuk menyiapkan *roadmap-roadmap* di sektor pembinaan masing-masing dirjen. Khususnya yang terkait pada tahun ini menjadi *mandatory* untuk bisa diterapkan neraca komoditinya. Selain itu, juga dalam rangka menunjang pendalaman struktur, substitusi impor dan hilirisasi, itu kita dorong untuk *roadmap*. Salah satunya mungkin di baja lalu di tekstil, semua kami kerjakan untuk pembuatan *roadmap*-nya.

Lalu yang tadi Bapak-bapak sampaikan Boma Bisma, ya Boma Bisma dulu di bawah binaan Kementerian Perindustrian dan kami menghasilkan mesin diesel yang baik tapi beberapa tahun terakhir memang program kita tidak nyambung Bapak. Tapi saat sekarang karena ada program TKDN dan bangga buatan Indonesia itu kami mencoba untuk lagi mengkaitkan dengan teman-teman Boma Bisma dengan pembelanjaan dari semua belanja pemerintah pusat, belanja daerah maupun belanja dari BUMN. Dan ini baru mulai gencar dengan target 400 triliun, mungkin Bapak dan Ibu semua sudah dengar dengan bangga buatan Indonesia di mana belanja pemerintah targetnya 400 triliun untuk belanja produk-produk dalam negeri. Yang mana dari 400 triliun diharapkan bisa mengkatrol 1,71 PDB.

Lalu tadi Bapak Gunhar menanyakan berbasis pesantren di luar Jawa dan Jatim, Bu Reni mungkin menambahkan tapi program ini sudah kami lakukan sejak lama Bapak dan ini sudah sebenarnya tidak hanya di Jawa, mungkin karena penduduk di Jawa dan Pontrennya banyak di Jawa dan anggaran mungkin terbatas tapi mungkin Bu Reni bisa menambahkan, tapi ini sudah kita lakukan di seluruh Indonesia.

Lalu Bapak Bambang ya Kementerian Perindustrian Pak Bambang Hermanto udah nggak ada, dari Golkar Pak Bambang Patijaya. Kementerian

Perindustrian menjadi salah satu support PNBPN yang tentunya, tapi PNBPN kami masih kecil juga Bapak tapi memang menjadi salah satu penyumbang PNBPN. Peningkatan populasi IKM dan standar di IKM sendiri memang ada program fasilitasi untuk pemberian standar, tidak hanya itu saja sebenarnya di IKM selain standar kami juga di IKM ada program pemberian fasilitasi merk, lalu juga untuk TKDN, TKDN itu kita fasilitasi dan halal juga ada di IKM.

Lalu *roadmap* hilirisasi, mungkin nanti Pak Arifin bisa menambahkan, Simira tadi sudah dijawab oleh Pak Putu. Lalu biaya kemahalan Bu Reni untuk bisa dibantu nanti fasilitasi biaya kemahalannya. Lalu untuk Pak Syaikhul Islam dari PKB ya serapannya rendah, memang tadi salah satunya adalah ada banyak program-program yang belum disampaikan tapi kami secara rutin di Kementerian Perindustrian Bapak, itu kita rutin 2 minggu sekali di dalam mengontrol realisasi, tapi memang banyak kendala-kendala yang tidak bisa kita kebut untuk bisa merealisasikan sesuai dengan target. Bapak Menteri sendiri sudah menargetkan 40% sampai 50% hingga Juni dan tentu ada konsekuensinya apabila tidak terealisasi masing-masing direktorat jenderal, Bapak. Lalu Pak Nasir nanti kami lengkapi permintaan Pak Nasir.

Mungkin sementara itu Bapak Ketua dan bila ada kekurangan.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Interupsi sedikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Dipersilakan Pak Tif.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Pak Sekjen, coba jelaskan tadi itu kenapa terjadi inkonsistensi data, kalau bikin laporan sebaiknya, jadi gini loh, kalau salah data itu kalau mau nembak orang, salah posisi salah orang Pak, bisa teman sendiri ketembak. Itu soal salah data itu, ini angka beda 2%, 3% ini besar Pak, jadi tolong nanti teman-teman membuat laporan tuh paling enggak eselon I dikoreksilah ya atau apa supaya yang datang ke kita ini, kita, itu kan akan jadi *base on*, *based on information* bagi kita, supaya kita juga nggak salah ngomong gitu loh. Ini kenapa kok beda sekian persen, sekian persennya ternyata memang mungkin ada perkembangan. Ini di kertas yang sama itu berbeda, begitu Pak Sekjen.

KETUA RAPAT:

Ya, saya mau menggarisbawahi diakui Pak ya kesalahan data itu.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Sebetulnya jadi mohon maaf Bapak Ketua izin, ini karena perkembangan Pak Tifatul. Kalau tanggal 31 kami buatnya itu berdasarkan posisi 26 dan hari ini 28% yang disampaikan oleh Bapak Putu tadi Pak,

mungkin itu perkembangannya. Jadi, *alhamdulillah* selama tanggal 31 Mei ini ada perkembangan 2%, mungkin koreksi kami.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Pak Sekjen, saya tidak terlalu dalam, jadi yang penting konsistensi aja misalnya perkembangan, kasih tahu di situ catatan. Ini perkembangan sampai segini di situ nggak ada catatan kaki atau apa. Jadi, persepsi kita tetap itu tanggal yang sama dengan angka yang berbeda.

KETUA RAPAT:

Jadi *clear* Pak ya, itu pun kalau sampai begitu parah betul ini lagi-lagi ini data nggak main-main soal akurasi data, presisi itu menjadi sangat penting karena menjadi dasar kebijakan. Saya kira udah jadi karena ternyata itu catatan perkembangan, mungkin ada catatan kaki bahwa angka yang disampaikan ini adalah Pak Sekjen sekian karena berbasis angka, tahun dan tanggal sekian. Sementara yang di masing-masing dirjen adalah angka aktual hari ini kan bisa kita bisa kita elaborasi.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Oke, terima kasih banyak Bapak.

KETUA RAPAT:

Cukup atau ada tambahan dari Dirjen yang lain?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Mungkin Bu Reni.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, SH.):

Mungkin sedikit Pimpinan, mungkin di rapat berikutnya mungkin setelah ini mungkin data yang kita minta tadi udah ada ya.

KETUA RAPAT:

Iya kita sampaikan, jadi Pak Dirjen, eh Pak Sekjen, usai ini kan juga masih eselon I Kemenperin sampaikan bahwa sampai satuan tiga, ya jelas ya.

Oke, kalau masih ada tambahan Ibu Dirjen IKMA.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Ijin Pak, menambahkan.

Mungkin ini Pak Nasir yang terhormat, mungkin kami salah ini aja. Mungkin yang dimaksud satuan tiga B memang formatnya seperti ini Pak, di

sana ada nama kegiatan, jenis kegiatan, satuan pagu, kemudian juga pelaksanaan, *output* dan juga progres kegiatannya. Jadi, kalau untuk yang detail sebagaimana Bapak sampaikan mungkin di POK ataupun di rincian kegiatannya Pak, memang seperti itu.

Jadi, yang kami siapkan memang sesuai dengan agenda kita hari ini.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Bu, satuan tiga itu terperinci, barang apa yang Ibu beli, berapa nilai harganya, berapa *quantity*-nya diserahkan di sini.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Iya tapi itu judulnya mungkin di tataran perencanaan tidak seperti itu Pak ya, di 3B.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Ya mungkin tadi yang disampaikan teman saya Pak Tifatul, mungkin sekjennya terlalu pintar membuat data, jadi datanya diputar-putar aja, sama juga dirjen yang lain gitu. Intinya kita minta rincian detail, Bu.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Iya baik Pak, untuk yang berbasis pondok pesantren tadi Pak, apa yang disampaikan Pak Gunhar juga memang yang terlihat di sini hanya Jawa Barat, Jawa Timur kemudian juga seolah-olah hanya di Jawa, Pak. Tapi ini kan kami menindaklanjuti beberapa yang belum selesai di tahun lalu, jadi masuknya di tahun ini, tapi kata kuncinya memang kami memfasilitasi ataupun kegiatan wirausaha baru itu di pondok pesantren yang mempunyai unit bisnisnya ataupun sudah ada cikal bakal seperti itu ataupun.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Interupsi Pimpinan, Bu, Ibu prioritaskan saja Anggota Komisi VII baru yang lain. Kalau nggak anggaran yang kita setuju itu percuma untuk Ibu, nggak ada manfaatnya. Nanti 2023 kita hapus semua anggaran itu, gitu aja Ibu intinya harus faham prioritaskan dulu Anggota Komisi VII baru yang lain gitu.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Siap Pak, ini kan saya menjawab apa yang disampaikan Pak Gunhar ke depannya akan kita prioritaskan, tapi kembali lagi berdasarkan proposal yang diajukan ya Pak Nasir yang terhormat.

Jadi, sebagai catatan juga apa yang disampaikan Pak Bambang.

KETUA RAPAT:

Iya, ya Pak Gunhar.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Ini kan program anggaran 2023, ini ke depan, maksudnya kan Ibu bilang 2023, ya ini ke depan, maksudnya kan Ibu bilang 2023 ke depan mau diusulkan berdasarkan proposal. Ini kan kawan-kawan udah ada pelatihan Bu tiap dapil. Nah, hasil dari pelatihan ini, mereka ini membutuhkan bantuan baik itu modal kerja ataupun apa bentuknya. Jadi, program yang tadinya ada pelatihan jadi bisa berkelanjutan karena 2023 ini tahun politik kita, Bu. Kalau mau nunggu proposal ya kita sulit, tapi kalau sudah dianggarkan bentuk sama kemarin pelatihan, terus tahun ini kita anggarakan kembali tindak lanjut dari pelatihan itu, bentuk bantuan modal kerja atau bantuan peralatan produksi. Nah, dari setiap dapil temen-temen itu bisa dilaksanakan Bu tanpa harus menunggu proposal apa, setelah anggarannya ada. Nah, baru kita nanti ke lapangan apa yang dibutuhkan masyarakat, berapa *budget* yang disiapkan oleh dari kementerian itu yang penting.

Itu aja Pimpinan.

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Baik Pak.

Mohon izin Pak, kalau untuk yang WUB berbasis pondok pesantren kebetulan Kementerian Perindustrian juga punya MoU dengan Kementerian Agama. Jadi, apa yang disampaikan Pak Gunhar mungkin agak beririsan dengan apa yang kita lakukan untuk menumbuhkan wirausaha baru daerah potensial, mungkin itu.

Jadi, untuk tahun ini kami melakukannya karena ini program sejak tahun 2013 sampai saat ini kita sudah melakukan pembinaan terhadap kurang lebih 89 pondok pesantren, tujuannya untuk menumbuhkan wirausaha baru di pondok pesantren yang memang sudah mempunyai unit bisnis dan juga mempunyai kurikulum untuk wirausaha. Jadi, sudah banyak sekali minimal pesantren itu memenuhi kebutuhan internalnya dari tindakan yang dilakukan.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Izin Pimpinan, Bu ke depan Ibu tanya aja anggota semua gitu aja ya.

F-PDIP (BAMBANG DWI HARTONO):

Izin Pimpinan, tadi belum ada jawaban terkait dengan problem yang dialami masyarakat yang berusaha ke luar dari krisis dengan kebijakan PGN tentang uang jaminan. Nah, kesan saya kan kemudian kementerian lembaga itu instansi sudah disetujui, pertanyaan saya tadi kan apakah ada hubungan intervensi dari Kementerian Perindustrian terutama yang menangani usaha kecil menengah untuk membantu problem yang jadi keberatan warga ini, persoalan jaminan, uang jaminan. Jadi, 3 persoalan yang disampaikan warga,

2 sudah selesai, yang selesai 1 kesalahan kategori. Jadi, ada kesalahan pengkategorian waktu itu akhirnya dikoreksi PGN *oke*, udah selesai. Yang kedua, terkait dengan pengenaan PPN 11% juga sudah selesai. Yang menjadi keberatan warga ini kan terkait uang jaminan yang memberatkan, sehingga keberatan ini bahkan sampai kemudian disegel, diblokir sehingga tidak bisa memproduksi.

Pertanyaan saya sekali lagi, apakah tidak memungkinkan dari kementerian utamanya Direktorat Jenderal Usaha Kecil Menengah ya untuk intervensi ke masalah-masalah seperti ini. Sangat mungkin ini hal semacam ini terjadi di tempat lain, sehingga rakyat ini kan tahunya loh ini sudah disetujui, bagaimana pendekatan di pusat terhadap problem-problem kerakyatan seperti ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya tadi perihal gas itu, memang gas kan ada untuk industri kecil menengah kan ada semacam afirmatif *policy*, kebijakan memihak dengan 6 dolar per mbptu misalnya dan berbagai pendekatan, berbagai skema yang tadi disampaikan Pak Bambang DH ada banyak masalah yang, coba kalau memang ada untuk disampaikan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Izin Bapak Ketua, terima kasih banyak.

Terima kasih Pak Bambang DH.

Kementerian Perindustrian saat ini sedang memperjuangkan bagaimana industri mendapat gas sebagai bahan baku dan energi dengan harga di bawah 6 dolar. Sampai saat sekarang ada sekitar 172 industri yang sudah mendapatkan fasilitas tersebut, perjuangan kami saat ini belum selesai karena kita ingin mendapatkan harga 6 dolar itu *no left behind*, tidak ada industri yang tertinggal untuk 6 dolar ini, walaupun perjuangannya masih panjang dan belum. Kami sampai sekarang masih melengkapi kajian itu karena permintaan permintaan dari ESDM, dari teman-teman KSP maupun dari Menko.

Dengan yang problem yang tadi Pak Bambang DH sampaikan bahwa ada industri kecil, sekelompok industri di Sidoarjo mendapat permasalahan dan kami baru mendengar ini. Akan lebih baik tolong kami disampaikan secara detail permasalahan nanti kita sampaikan ke temen-temen IKM, bagaimana mencari jalan ke luarnya. Mungkin itu dulu Pak Ketua dan itu jalan tengahnya ya.

Terima kasih banyak Bapak.

KETUA RAPAT:

Oke, kita anggap cukup ya.

Jadi, segala sesuatu menjadi catatan yang disampaikan anggota Dewan yang terhormat perihal tentang bagaimana serapan anggaran dan ketepatsasaran dari anggaran itu sendiri. Saya kira semuanya menjadi *concern* kita bersama untuk diperbaiki juga laporannya, begitu Pak Sekjen dan segenap dirjen yang lain.

Kita cukupkan Rapat Dengar Pendapat kali ini sebelum kita tutup kita sampaikan kesimpulan dari rapat dengar pendapat kali ini dengan eselon I sebagaimana terpapar di layar.

Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Eselon I Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, yakni Sekjen, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, Dirjen Agro, Dirjen Industri Kecil Farmasi dan Tekstil, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika:

1. Komisi VII DPRRI dapat memahami penjelasan sekjen, dirjen dan seterusnya, perihal mengenai progres pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 yang akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan RKP dan RKAKL tahun 2023.

Begitu? Kita memahami kok malah gimana, Pak Sekjen kok masih, apa itu?

DIRJEN IKMA KEMENPERIN RI (RENI YANITA):

Mohon maaf di atasnya nomenklatur IKFT Pak, Industri Kimia, Farmasi dan kalau nggak salah kecil ya Pak, Industri Kecil Farmasi dan Tekstil itu, Pak.

KETUA RAPAT:

Betul itu, hanya itu, nomor 1 setuju?

(RAPAT : SETUJU)

2. Komisi VII DPRRI mendorong sekjen, dirjen dan seterusnya untuk meningkatkan serapan anggaran tahun anggaran 2022 sesuai target masing-masing lembaga.

Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VII DPRRI meminta dan seterusnya, untuk menyampaikan perbaikan data satuan tiga tahun anggaran 2022 secara konsisten dan lengkap.

Setuju?

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

KETUA RAPAT:

Klo nggak ya kebangetan, ngangguknya kok lambat gitu Pak Sekjen. Ini ke mana lagi Pak Nasir, belum dulu jangan dulu pergi.

4. Komisi VII DPRRI mendorong sekjen, dirjen dan seterusnya-seterusnya untuk mengupayakan solusi permasalahan bagi industri kecil dan menengah dan meningkatkan sosialisasi yang berdampak langsung kepada masyarakat banyak, berdampak langsung terhadap pemahaman atau apa, meningkatkan sosialisasi program yang berdampak langsung.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah itu bahasanya Pak, nggak usah ada sosialisasi Ketua, nggak butuh sosialisasi ini masyarakat. Jadi, barang ini yang penting, barang alat bantu kerja buat masyarakat gitu.

ANGGOTA KOMISI VII DPRRI:

Meningkatkan program yang berdampak langsung.

F-PD (MUHAMMAD NASIR, S.H.):

Nah, gitu sosialisasinya hilang, nggak ada sosialisasi lagi.

KETUA RAPAT:

Oke, udah cukup?

(RAPAT : SETUJU)

5. Komisi VII DPRRI meminta sekjen dan seterusnya untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan anggota Komisi VII DPRRI dan disampaikan paling lambat tanggal 22, eh tanggal 20 Juni 2022.

Sanggup Bapak Sekjen dan Dirjen?

(RAPAT : SETUJU)

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Sanggup.

KETUA RAPAT:

Baiklah, Bapak/Ibu sekalian.

Kita bersyukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Mahakuasa bahwa hari ini kita telah melakukan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPRRI dengan Eselon I Kementerian Perindustrian yang telah dihadiri oleh Sekjen, Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, Dirjen Industri Agro, Dirjen Industri IKFT, ya Kimia ya bukan kecil ya, Kimia, Farmasi dan Tekstil dan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika ILMATE.

Syukur *alhamdulillah* rapat berjalan baik dan saling memberi masukan dengan baik untuk semuanya adalah demi kebaikan kita bersama ke depan. Untuk itu sebelum kita tutup dipersilahkan Pak Sekjen untuk menyampaikan semacam *closing statement*.

Dipersilakan.

SEKJEN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (IR. DODY WIDODO, M.Si.):

Terima kasih banyak, Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua atas diskusi dan masukannya pada hari ini.

Kami akan melengkapi sesuai catatan tadi, kesimpulan dan *Insyah* Allah pada tanggal 20 nanti kita selesaikan pertanyaannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kami mohon maaf sehingga pada rapat-rapat selanjutnya kita bisa selesaikan permasalahan ini.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* Rapat Dengar Pendapat Eselon I Kementerian Perindustrian, saya nyatakan ditutup.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.18 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

Dra. Nanik Herry Murti
NIP.196505061994032002